

**ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI
SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN
GERBANGKERTOSUSILA
TAHUN 2006-2015**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**MAR'ATUS SHOLICHA
135020101111037**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



KONSENTRASI EKONOMI SUMBER DAYA

JURUSAN ILMU EKONOMI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

**ANALYSIS ON FACTORS AFFECTING POVERTY IN
THE DEVELOPMENTAL REGION UNIT OF
GERBANGKERTOSUSILA
DURING 2006-2015**

THESIS

**By:
MAR'ATUS SHOLICHA
135020101111037**

**Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Attainment of the Degree of *Bachelor of Economics***



**DEPARTEMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di
Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015"

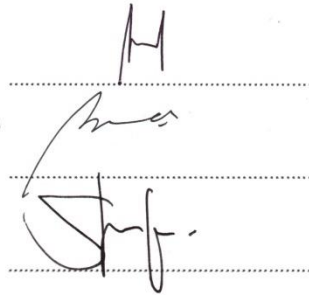
Yang disusun oleh :

Nama : Mar'atus Sholicha
NIM : 135020101111037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **13 Desember 2017**
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Ajeng Kartika Galuh, SE., ME
NIP. 2012018512212001
(Dosen Pembimbing)
2. Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D
NIP. 19620315 198701 1 001
(Dosen Penguji I)
3. Shofwan, SE., M.Si
NIP. 19730517 200312 1 002
(Dosen Penguji II)



Malang, 04 Januari 2018
Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME
NIP. 19691210 199703 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**“Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
Di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila
Tahun 2006-2015”**

Yang disusun oleh :

Nama : Mar'atus Sholicha
NIM : 135020101111037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,


Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME
NIP. 19691210 199703 1 003

Malang, 04 Januari 2018
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,


Ajeng Kartika Galuh, SE., ME.
NIP. 2012018512212001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Mar'atus Sholicha
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 09 September 1995
NIM : 135020101111037
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya
Alamat : Jl. Kertoleksono No. 49, Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 04 Januari 2018

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Ajeng Kartika Galuh, SE., ME.
NIP. 2012018512212001

Yang membuat pernyataan,

Mar'atus Sholicha
NIM. 135020101111037

Mengetahui,
Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,

Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME
NIP. 19691210 199703 1 003

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mar'atus Sholicha

Prodi Ekonomi Pembangunan I Jurusan Ilmu Ekonomi I
Universitas Brawijaya I 2013
rirismaratussholicha@gmail.com
(+62) 822 9828 3868

DATA PRIBADI

Tempat Lahir

Pasuruan

Tanggal Lahir

09 September 1995

Jenis Kelamin

Perempuan

Agama

Islam

Alamat

Jl. Kertoleksono No. 49, RT.06 RW.03, Malang

Jl. Imam Bonjol V, RT.005, RW.004, Pasuruan

PENDIDIKAN FORMAL

TK Pertiwi 3 Pasuruan

1999-2001

SDN Mandaran Rejo 1 Pasuruan

2001-2007

SMP Negeri 9 Pasuruan

2007-2010

SMK Negeri 1 Pasuruan

2010-2013

Universitas Brawijaya Malang

2013-2017

PENDIDIKAN NON FORMAL

Peserta Magang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Jawa Timur

Surabaya, Jawa Timur

2016

PENGALAMAN ORGANISASI

Staff Tetap Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HMJIE)

Staff Divisi Administrasi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

2014-2015

PENGALAMAN KEPANITIAAN

**Orientasi Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi
TRANSFORMER 2015**

Asisten Koordinator Divisi Administrasi
2015

**Intellectual Dialogue of Economic
IDE XIII 2015**

Asisten Koordinator Divisi Administrasi
2015

**Pemilihan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi
PEMILWA 2015**

Staff Divisi Administrasi
2015

Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.

Dan Skripsi yang lebih baik adalah skripsi yang dikerjakan.

Skripsi itu punya ceritanya sendiri. Skripsi itu punya jalannya sendiri. So be enjoy ya beb ;)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015”**. Penyusunan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Proses penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Akan tetapi, berbagai kendala tersebut dapat diatasi berkat banyaknya bantuan dan dukungan yang tak terhingga dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas hidayah dan kasih sayang-Nya, serta memberi segala nikmat yang begitu indah dan kekuatan paling besar yang tak terhingga dari-Nya kepada penulis
2. *My Support System*, Ibundaku Rasminingsih dan Bapak Arif Hendro P yang telah membimbing penulis, yang selalu mendoakan dan mendukung apapun yang terbaik bagi penulis, terima kasih atas perjuangannya selama ini. Serta kedua adik penulis, Khilmi Rahmawati dan Qurrotu A'yunin yang menjadi adik-adik terbaik yang di berikan Allah SWT di dunia ini, yang selalu mengerti dan selalu memahami keadaan penulis, yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis selama proses penyelesaian skripsi hingga selesai.

3. Bapak Drs. Nurkholis, M.Buss., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
5. Ibu Nurul Badriyah, SE., ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi
6. Ibu Ajeng Kartika Galuh, SE., ME selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, saran dan membantu dalam penyelesaian skripsi penulis. Terima kasih banyak Ibu, atas kesabaran, perhatian, dan semangatnya selama ini.
7. Bapak Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D dan Bapak Shofwan, SE., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi.
8. Keluarga kos kerto tersayang, Lisa Rahmania, Swastikaraton Souminar, Arifia Latifa Salma dan adikku tersayang Intan Purnamasari Dian Pertiwi dan Cindy Erlinda, selaku keluarga kecil di tanah rantau yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti. Terima kasih banyak untuk kenangan, kebahagiaan dan kebersamaannya.
9. *Best Supporters* dan *Best Ultras* (AC), Yuli Fatmasari, Ermantha Rani, Imas Lanang Syahputra, Desi Novita Aulya, Sefrida Ayu Kurnia Sari, Bella Arum Kristanti, Adityo Budi Rachmanda, Fathul Bari, Riza Pahlevi dan Mourina Anugerah Putri, selaku sahabat seperjuangan dari awal hingga akhir perkuliahan yang selalu memberikan semangat dan motivasi, yang siap siaga membantu, yang rela direpoti, yang sabar luar biasa di gupuhi. Terima kasih banyak, kalian terbaik.
10. Nur Azizah, Risqa Amalia, Hanif Prawita, Siti Rachmi, Muhammad R Ridho dan teman-teman kuliah lainnya yang turut memberikan dukungan moril dan motivasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih banyak untuk selalu ada disaat apapun, yang tiada henti memberikan semangat dan dukungannya, yang selalu membantu dan direpotkan oleh penulis, serta memberikan kenangan kebahagiaan di akhir masa perkuliahan.

11. Muchamad Ilham Imawan, terima kasih sebanyak-banyak untuk doa, dukungan, serta bantuannya. Dan terima kasih sudah rela direpotkan oleh penulis selama ini.
12. Mokhamad Fatkhur Rozi, saudara sekaligus teman seperjuangan dari TK hingga menjadi mahasiswa dan anak rantau, yang selalu memotivasi dan menyemangati penulis.
13. Sahabat since 2010, Reza Akhmaludin Nur Aziz. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya, serta saran dan pemikiran-pemikiran baru paling sederhananya untuk penulis.
14. Adik-adik tergemas yang selalu mendukung dan memberikan semangat, Chili-ku si anak Kraken, Ilmu Kelautan'14
15. Teman seperjuangan kampus tetangga, Mbak Yanto, Trisya, Okta, Yuli, Bibi, Trio, Andri, Habibi, Hanif, Mukromin, Hormat, Arifin. Terimakasih atas dukungannya pada penulis.
16. Keluarga besar tercinta, Nenek tersayang Mbah uti Surasmi, Om Askurin, Tante Ida, Mak Ju, Mak Nurul, Adik Ira dan keponakan-keponakan penulis, yang selalu menyemangati, mendoakan serta memberikan dukungannya, dan yang selalu mengerti kondisi penulis disaat banyak yang tidak mengerti.
17. Almarhum Ayahanda tercinta, Ayah Kasiyono, selaku sosok ayah yang selalu menjadi panutan penulis dalam hal apapun. Menjadi sosok penguat serta pengingat disaat penulis ingin menyerah, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini yang penulis persembahkan untuk beliau, cinta pertamaku, Ayahku.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangannya, karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan pendidikan di Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya untuk masa yang akan datang. Khususnya seluruh civitas akademika pada umumnya. Semoga segala jerih payah dan amal ibadah semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan dan ridho-Nya dari Allah SWT.

Malang, Januari 2018

Mar'atus Sholicha

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP PENULIS	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAKSI	xxi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Kemiskinan	17
2.1.1.1 Jenis Kemiskinan	19
2.1.1.2 Ukuran Kemiskinan	20
2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan	24
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	25
2.1.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan	28
2.1.3 Upah Minimum	29
2.1.3.1 Hubungan Upah Minimum dengan Tingkat Kemiskinan	32
2.1.4 Pendidikan	33

2.1.4.1 Hubungan Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan	36
2.1.5 Pengangguran	36
2.1.5.1 Hubungan Pengangguran dengan Tingkat Kemiskinan	39
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Kerangka Pikir	47
2.4 Hipotesis	50

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.....	51
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.3 Metode Pengumpulan Data	51
3.3.1 Jenis Data	51
3.3.2 Sumber Data	52
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data	53
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	53
3.5 Metode Analisis	56
3.6 Regresi Linier Berganda Untuk Data Panel	57
3.7 Metode Estimasi Model Regesi Data Panel	58
3.8 Uji Penentuan Model	59
3.9 Uji Statistik	61
3.9.1 Uji Parsial (Uji t)	61
3.9.2 Uji Simultan (Uji F)	61
3.9.3 Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)	62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila	63
4.2 Tinjauan Tingkat Kemiskinan di Gerbangkertosusila	67
4.3 Tinjauan Pertumbuhan Ekonomi di Gerbangkertosusila	69
4.4 Tinjauan Tinjauan Upah Minimum di Gerbangkertosusila	70
4.5 Tinjauan Tingkat Pendidikan di Gerbangkertosusila	72
4.6 Tinjauan Tingkat Pengangguran di Gerbangkertosusila	73

4.7	Hasil Pengujian Statistik	75
4.7.1	Pemilihan Model Regresi Panel	75
4.8	Hasil Uji Regresi Data Panel	76
4.9	Hasil Pengujian Signifikansi	79
4.9.1	Uji Parsial (Uji t)	79
4.9.2	Uji Simultan (Uji F)	80
4.9.3	Koefisien Determinasi (R^2)	80
4.10	Pembahasan dan Analisis Hasil Regresi	81
4.10.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila	81
4.10.2	Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila	96
4.10.3	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila	97
4.10.4	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila	99
4.11	Implikasi Hasil Penelitian	100
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	113
5.2	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....		118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Upah Minimum Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2010	9
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	43
Tabel 4.1	Luas Wilayah dan Jumlah Kepadatan Wilayah (/Km ²)	67
Tabel 4.2	Upah Minimum Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila Tahun 2006 dan 2015 (Dalam Rp)	71
Tabel 4.3	Rata-Rata Lama Sekolah di Gerbangkertosusila Tahun 2006 dan 2015 (Dalam Tahun)	73
Tabel 4.4	Hasil Pemilihan Model Regresi Panel	76
Tabel 4.5	Hasil Regresi	77
Tabel 4.6	Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Gresik Tahun 2013-2015	82
Tabel 4.7	Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik Tahun 2015	83
Tabel 4.8	Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2015	84
Tabel 4.9	Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bangkalan Tahun 2015	85
Tabel 4.10	Perkembangan PDRB Sektoral Kota Mojokerto Tahun 2013-2015	86
Tabel 4.11	Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Mojokerto Tahun 2015	86
Tabel 4.12	Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2015	88
Tabel 4.13	Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015	88
Tabel 4.14	Perkembangan PDRB Sektoral Kota Surabaya Tahun 2013-2015	89
Tabel 4.15	Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Surabaya Tahun 2015	90

Tabel 4.16	Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015	91
Tabel 4.17	Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015	92
Tabel 4.18	Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2015	93
Tabel 4.19	Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamongan Tahun 2015	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2006-2015	3
Gambar 1.2	Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015	6
Gambar 1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015	7
Gambar 1.4	Rata-Rata Lama Sekolah di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015	11
Gambar 1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015	12
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	47
Gambar 4.1	Peta Wilayah Gerbangkertosusila	66
Gambar 4.2	Presentase Penduduk Miskin Tahun 2006-2015 di Gerbangkertosusila	68
Gambar 4.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Gerbangkertosusila Tahun 2006 dan 2015 (Persen)	69
Gambar 4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka di Gerbangkertosusila Tahun 2006 dan 2015 (Persen)	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015	124
Lampiran 2	Data Transformasi Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015	126
Lampiran 3	Hasil Regresi Model Data Panel <i>Pooled Least Square (Common Effect Model)</i>	128
Lampiran 4	Hasil Regresi Model Data Panel Pendekatan Efek Tetap (<i>Fixed Effect Model</i>).....	129
Lampiran 5	Hasil Regresi Model Data Panel Pendekatan Efek Acak (<i>Random Effect Model</i>).....	130
Lampiran 6	Hasil Regresi Penentuan Model	131
Lampiran 7	Hasil Regresi Penentuan Model (<i>Hausman Test</i>)	132
Lampiran 8	Hasil Regresi Penentuan Model (<i>Lagrange Multiplier Effect Test</i>).....	133

ABTRAKSI

Sholicha, Mar'atus. 2017. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Ajeng Kartika Galuh, SE., ME.

Kemiskinan adalah persoalan ekonomi makro dan salah satu masalah sosial yang tidak hanya sekedar angka yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Di Indonesia masih banyak daerah yang mengalami masalah kemiskinan, tidak terkecuali di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila sebagai kawasan metropolitan terbesar kedua setelah Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila periode tahun 2006-2015, yaitu antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif dengan menggunakan data panel. Data panel adalah gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2006-2015 dan data *cross section* jumlah observasi sebanyak 7 Kabupaten/Kota. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan hasil secara parsial menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel upah minimum dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kata kunci: *Tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran.*

ABTRACTION

Sholicha, Mar'atus. 2017. Analysis On Factors Affecting Poverty In The Developmental Region Unit Of Gerbangkertosusila During 2006-2015. Thesis, Departement Of Economics, Faculty Of Economics And Business, University Of Brawijaya. Ajeng Kartika Galuh, SE., ME.

Poverty is a macroeconomic issue and one of the social problems that is not just numbers faced by many countries in the world, including Indonesia. In Indonesia there are still many areas experiencing poverty problems, not least in The Developmental Region Unit Of Gerbangkertosusila as the second largest metropolitan area after Jabodetabek. This study aims to analyze the variables that affect the level of poverty in The Developmental Region Unit Of Gerbangkertosusila for the period of 2006-2015, which are among others Economic Growth, Minimum Wage, Education Level and Unemployment Rate. This research uses secondary data with quantitative method by using panel data. Panel data is a combination of time series data and cross section data. Time series data in this study used the period of 2006-2015 and cross section data of observation counted 7 districts / cities. The results showed that simultaneously all the variables significantly influence the Poverty Rate. While the results partially indicate that the variable of economic growth has a negative and insignificant effect on the poverty level, the minimum wage variable and the level of education have a negative and significant influence on the poverty level, and the unemployment rate has a positive and significant influence on the poverty level.

Keywords: *Poverty rate, economic growth, minimum wage, education level, and unemployment rate.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses transformasi atau adanya perubahan yang berlangsung secara terencana, bertahap dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup suatu bangsa. Atau dengan kata lain pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki secara terus-menerus dari kondisi yang sebelumnya tidak baik menjadi kondisi yang jauh lebih baik lagi. Sedangkan pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sekaligus merupakan proses rangkaian pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional.

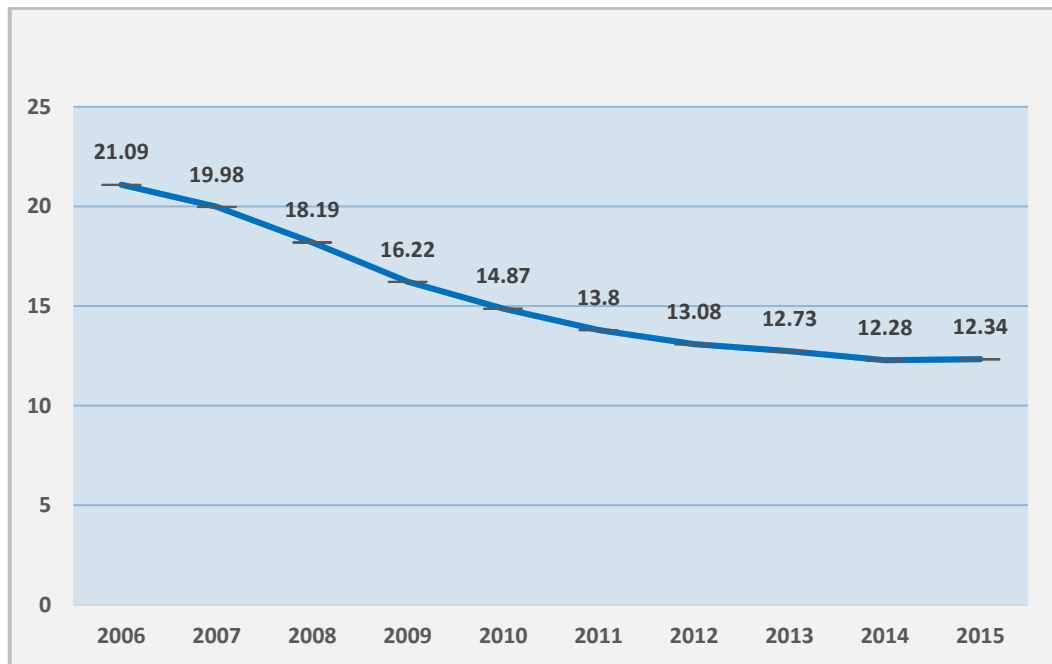
Menurut Simatupang dan Saktyanu (2003) dalam Saputra (2011), pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu sasaran dan keberhasilan pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Efektivitas dalam menurunkan tingkat kemiskinan merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti menjadi salah satu kriteria utama dalam pemilihan sektor andalan pembangunan nasional yaitu efektivitas dalam penurunan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan fenomena yang nyaris terdapat pada semua golongan negara. Kemiskinan tidak saja tumbuh dan berkembang dalam sistem negara miskin tetapi juga menjadi ancaman bagi negara maju dan berkembang,

tidak terkecuali Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga tidak lepas dari permasalahan dan problematika masalah kemiskinan yang menjadi masalah sentral yang telah dirasakan oleh masyarakat sejak lama. Semakin banyaknya jumlah penduduk dan disertai tidak meratanya pembangunan, lalu kurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan semakin tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di perkotaan maupun di pedesaan. Sumber Daya Manusia (SDM) juga berperan sangat penting dalam pembangunan tetapi jika kenyataannya kualitas Sumber Daya Manusia itu rendah maka itu dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah kemiskinan di negara-negara berkembang, dan sampai saat ini masalah kemiskinan di Indonesia sendiri masih belum sepenuhnya hilang dan teratasi.

Kemiskinan menurut Kuncoro dalam Widodo (2011) adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan standar hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Permasalah standar hidup yang rendah ini berkaitan dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah pula sehingga akibatnya adalah rendahnya sumber daya manusia yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Menurut UNESCO dalam Assegaf (2015), kemiskinan adalah sebuah kondisi dengan berbagai dimensi yang saling berkaitan erat dan dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu *Pertama*, minimnya pendapatan tetap, aset-aset produktif, dan akses terhadap jaring pengaman social. *Kedua*, minimnya akses terhadap layanan seperti pendidikan, kesehatan, informasi, kredit, air bersih, dan sanitasi. *Ketiga*, serta minimnya kekuatan politik, partisipasi, martabat dan kehormatan.

Gambar 1.1: **Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2006-2015 (Dalam %)**



Sumber: BPS Jawa Timur yang diolah, 2016.

Dari data tingkat kemiskinan pada gambar 1.1 dapat terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur selama kurun waktu 10 tahun dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang bisa dikatakan sebagai indikator yang cukup baik. Setelah adanya upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Jawa Timur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan Jawa Timur mencapai angka 21.09%, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2014 dimana tahun 2014 tingkat kemiskinan Jawa Timur sebesar 12.28%. Namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 12.34%. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2015, dalam kurun waktu 9 tahun dari tahun 2006-2014 tingkat kemiskinan di Jawa Timur turun hingga hampir kurang sebesar 8.75%. Namun itu belum merupakan sebuah keberhasilan untuk Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan yang masih belum sepenuhnya teratasi. Ini bisa dilihat dari tingkat kemiskinan di Jawa timur yang masih relatif tinggi, yaitu berada di angka diatas 10% .

Berkaitan dengan masalah kemiskinan di Jawa Timur. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah yang nantinya dapat mengentaskan kondisi kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur dan PP No. 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional menetapkan kawasan kerjasama yang dikelompokkan dalam 9 Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Salah satu wilayah pembangunan yang ada di Jawa Timur adalah SWP I Gerbangkertosusila yang di dalamnya terdiri dari 7 Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan.

Wilayah Gerbangkertosusila merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua setelah Jabodetabek. Tidak hanya itu, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional juga menetapkan kawasan Gerbangkertosusila sebagai salah satu kawasan yang strategis nasional dari bidang kepentingan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Penetapan ini didasarkan atas fungsi kawasan dan aspek kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai mesin penggerak pengembangan wilayah nasional dari pertumbuhannya, pemerataan, dan integrasinya. Sehingga kawasan strategis nasional ini diharapkan dapat menjadi kawasan pusat pertumbuhan.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Glaeser dan Khan (2003) dalam Fitriyah dan Rachmawati (2013) kawasan SWP Gerbangkertosusila memiliki sektor unggulan industri serta memiliki kedekatan lokasi. Lalu menurut Swantoro (2011) Industri manufaktur adalah pola industri yang terkonsentrasi di dalam dan disekitar kota, dimana daerah kota memiliki potensi dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan industri terhadap input faktor produksi dan suatu

perusahaan juga akan mendapatkan manfaat yang ditimbulkan karena lokasi perusahaan satu dan lainnya yang berdekatan. Berdasarkan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur terkonsentrasi pada 3 (Tiga) SWP yaitu dimana Gerbangketosusila pada SWP 1, SWP 6 Malang-Pasuruan dan SWP 7 Kediri dan Sekitarnya. Pembagian wilayah ini sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur.

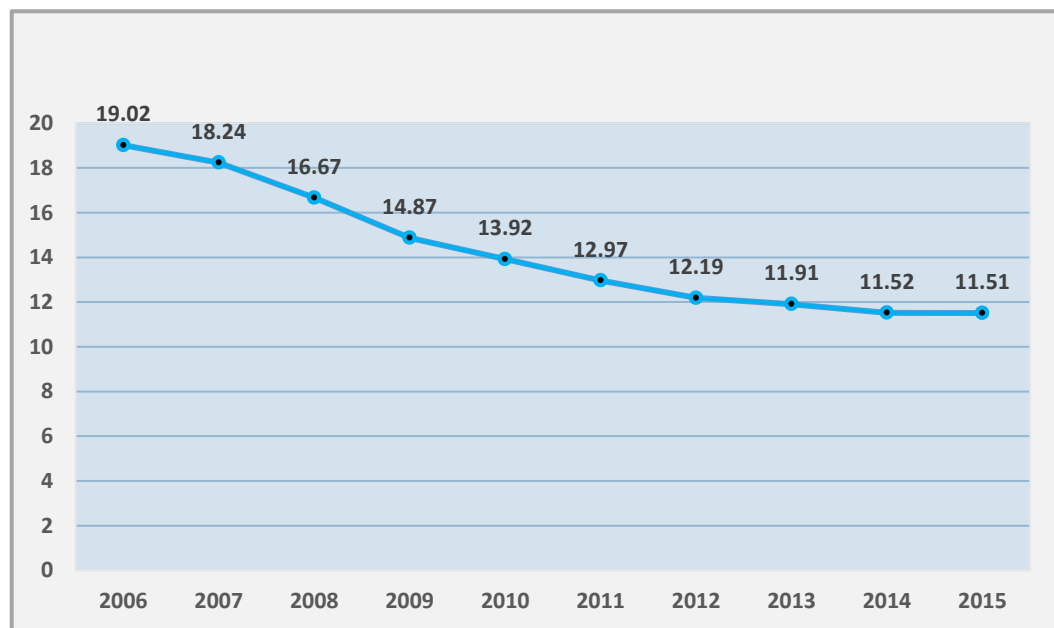
Dalam perkembangannya sektor industri dari ketiga SWP, SWP Gerbangketosusila adalah SWP yang memiliki perkembangan industri manufaktur yang paling menonjol dari yang lainnya. Di wilayah ini setiap Kabupaten memiliki kawasan industri estate, antara lain: 1) Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya, 2) Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto, 3) Kawasan Industri Jabon di Kabupaten Sidoarjo, 4) Lamongan Integrated Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan, dan 5) Kawasan Industri di Kabupaten Gresik.

Pada gambar 1.2 tingkat kemiskinan di SWP Gerbangketosusila dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2006 hingga 2015 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di SWP Gerbangketosusila mencapai angka 19.02%, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan SWP Gerbangketosusila adalah sebesar 12.28%. Dalam kurun waktu 10 tahun tingkat kemiskinan di SWP Gerbangketosusila turun hingga hampir kurang sebesar 7.51%.

Lalu untuk kondisi tingkat kemiskinan di SWP Gerbangketosusila masih belum merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinannya juga masih tinggi. Pada tahun 2015 terdapat 4 Kabupaten yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan di

atas angka 10%, yaitu Kabupaten Bangkalan 22.57%, Kabupaten Lamongan 15.38%, Kabupaten Gresik 13.63% dan Kabupaten Mojokerto 10.57%. Sedangkan untuk daerah Kota/Kabupaten yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan dibawah angka 10%, yaitu Kota Surabaya 5.82%, Kota Mojokerto 6.16% dan Kabupaten Sidoarjo 6.44%.

Gambar 1.2: Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015 (Dalam %)

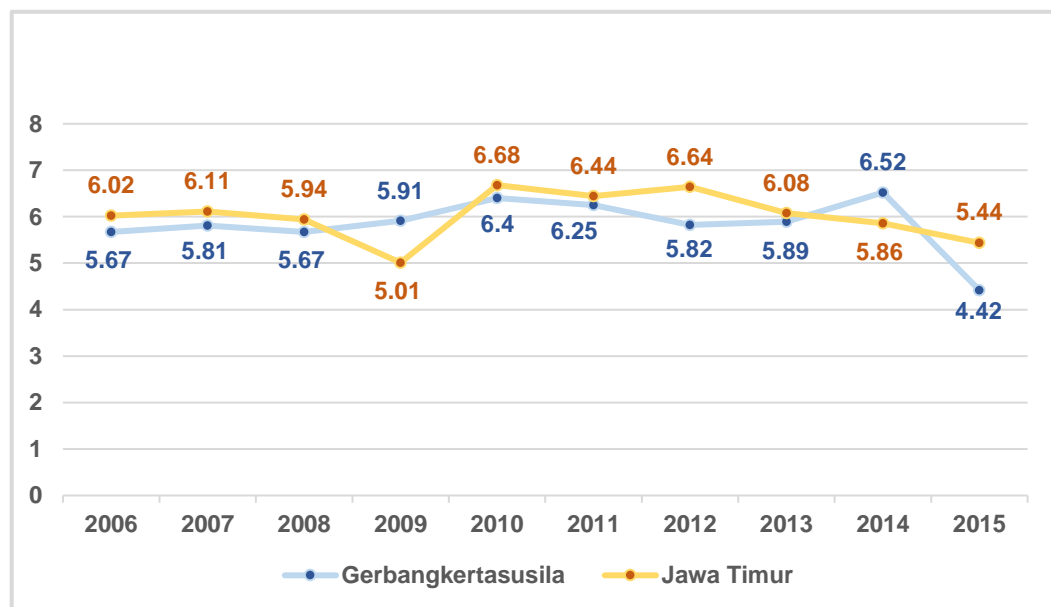


Sumber: BPS Jawa Timur yang diolah, 2016.

Menurut Wongdesmiwati (2009) proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dimana untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Syarat kecukupan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut haruslah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk bagi golongan penduduk miskin (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Gambar 1.3: **Laju Pertumbuhan Ekonomi di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015**



Sumber: BPS Jawa Timur yang diolah, 2016.

Dalam gambar 1.3 dapat dilihat laju pertumbuhan di kawasan Gerbangkertosusila masih di bawah angka laju pertumbuhan ekonomi provinsi. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Gerbangkertosusila pada tahun 2006-2015 bergerak fluktuatif. Untuk laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2006 sebesar 6.02% lalu naik pada tahun 2007 sebesar 6.11% dan turun pada tahun 2008 dan 2009, naik kembali pada tahun 2010 sebesar 6.68% dan kembali turun sebesar 6.44% tahun 2011, lalu naik kembali sebesar 6.64% pada tahun

2012 dan mengalami penurunan pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sampai 2015. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertosusila pada tahun 2006 ke 2007 mengalami kenaikan sebesar 5.67% ke 5.81%, lalu turun pada tahun 2008 dan kembali naik pada 2 (dua) tahun selanjutnya, namun turun kembali pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 6.25% dan 5.82%, lalu naik pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 5.89% dan 6.52%, dan pada tahun 2015 kembali turun sebesar 4.42%.

Di suatu wilayah yang berkarakteristik banyak industri yang menyerap banyak tenaga kerja seperti Provinsi Jawa Timur, upah minimum juga merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kesejahteraan atau kemiskinan penduduk. Kebijakan upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan, gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh (Sumarsono, 2003).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2006 sampai tahun 2015 tingkat upah minimum di Kabupaten/kota Gerbangkertosusila terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 upah minimum Kabupaten/Kota tertinggi terdapat pada Kota Surabaya sebesar Rp.2.710.000. Untuk daerah lain yang sudah mencapai upah minimum di angka Rp.2.000.000 terdapat pada Kabupaten Gresik sebesar Rp.2.707.500, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp.2.705.000 dan Kabupaten Mojokerto juga sebesar Rp.2.695.000. Untuk Kota Mojokerto dan Kabupaten Lamongan sudah berada di angka Rp.1.000.000 yaitu Rp.1.437.500 dan Rp.1.410.000. Sementara untuk upah minimum Kabupaten/Kota di Kabupaten

Bangkalan memang sudah mencapai Rp.1.000.000 tetapi masih menjadi upah minimum Kabupaten/Kota terendah di kawasan Gerbangkertosusila yaitu sebesar Rp.1.267.300.

Tabel 1.1: **Upah Minimum Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2010 (Dalam Rp)**

T A H U N	DAERAH						
	Kab. Gresik	Kab. Bang- kalan	Kota Mojokerto	Kab. Mojokerto	Kota Surabaya	Kab Sidoarjo	Kab Lamongan
2006	665.200	550.000	565.000	655.200	655.500	655.200	558.000
2007	743.500	586.000	656.600	740.000	746.000	743.500	600.000
2008	803.652	622.000	687.500	803.652	805.500	802.000	650.000
2009	971.624	715.000	760.000	971.624	948.500	955.000	760.000
2010	1.010.400	775.000	805.000	1.009.150	1.031.500	1.005.000	875.000
2011	1.133.000	850.000	835.000	1.105.000	1.115.000	1.107.000	900.000
2012	1.257.000	885.000	875.000	1.234.000	1.257.000	1.252.000	950.000
2013	1.740.000	983.800	1.040.000	1.700.000	1.740.000	1.720.000	1.075.700
2014	2.195.000	1.102.000	1.250.000	2.050.000	2.200.000	2.190.000	1.220.000
2015	2.707.500	1.267.300	1.437.500	2.695.000	2.710.000	2.705.000	1.410.000

Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang diolah, 2016.

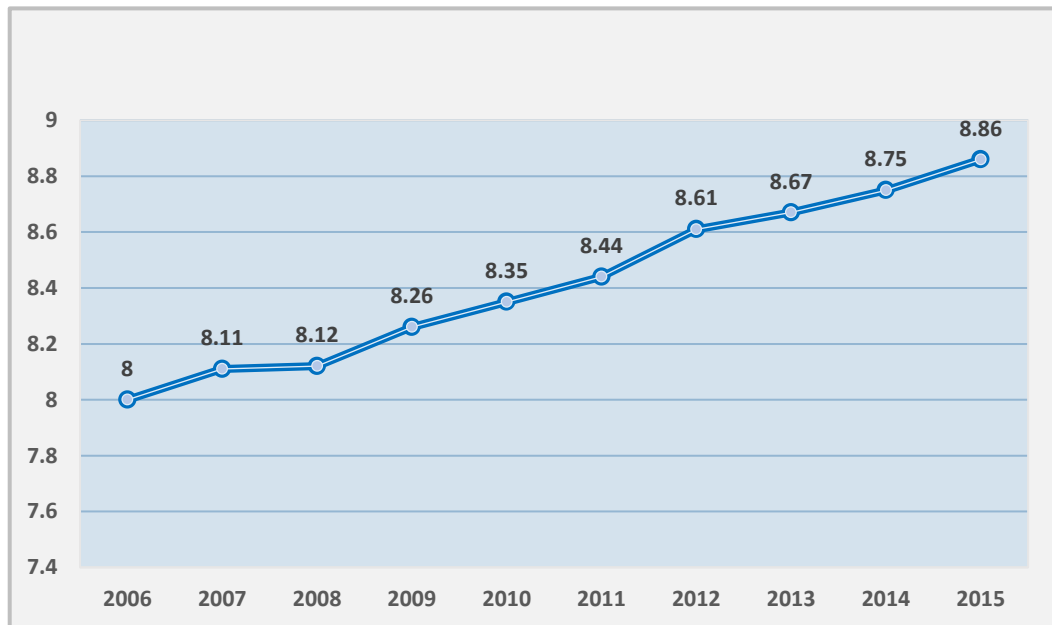
Selanjutnya rendahnya kualitas penduduk juga menjadi salah satu penyebab masalah kemiskinan di suatu negara. Rendahnya kualitas penduduk ini dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Dalam penelitian Prastyo (2010) dijelaskan faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah pendidikan, dimana dengan melakukan investasi di bidang pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masing-masing individu atau seseorang. Jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka

pengetahuan dan keahliannya juga akan meningkat, sehingga juga dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja.

Gambar 1.4 menunjukkan rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota untuk penduduk usia 15 tahun ke atas di kawasan Gerbangkertosusila pada tahun 2006-2015 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di kawasan Gerbangkertosusila memberikan kontribusi kenaikan sebesar 0.86 tahun. Meskipun memberikan sumbangan kontribusi kenaikan yang tidak terlalu besar, akan tetapi rata-rata lama-lama sekolah menunjukan peningkatan yang menunjukkan indikator yang cukup baik.

Pada tahun 2015 untuk daerah yang mengenyam pendidikan formal 10 tahun yang setara dengan kelas 1 tingkat Sekolah Menengah Atas yang diantaranya yaitu Kota Surabaya sebesar 10.54 tahun, Kabupaten Sidoarjo sebesar 10.46 tahun dan Kota Mojokerto sebesar 10.10 tahun. Untuk daerah Kabupaten Gresik rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 sebesar 9.31 tahun yang setara kelas 3 di tingkat Sekolah Menengah Pertama, lalu Kabupaten Mojokerto sebesar 8.19 tahun yang setara kelas 2 di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Kabupaten Lamongan sebesar 7.61 tahun yang setara kelas 2 di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan yang terakhir Kabupaten Bangkalan yang tingkat rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 5.79 tahun yang setara dengan kelas 6 ditingkat Sekolah Dasar. Kabupaten Bangkalan juga menjadi daerah yang memiliki nilai rata-rata lama sekolah terendah diantara daerah yang lain.

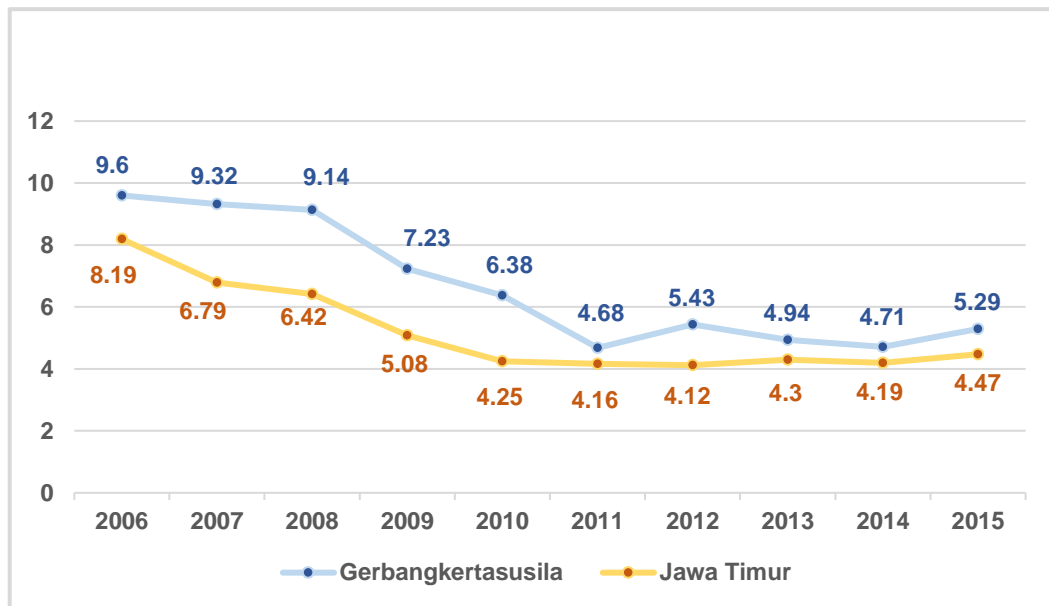
Gambar 1.4: **Rata-Rata Lama Sekolah di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangketosusila Tahun 2006-2015 (Dalam Tahun)**



Sumber: BPS Jawa Timur yang diolah, 2016.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang kompleks di negara berkembang. Pengangguran dan kemiskinan adalah suatu masalah yang selalu berjalan beriringan. Jika banyak masyarakat yang menjadi pengangguran, maka tingkat kemiskinan juga akan tinggi, dan begitu juga sebaliknya jika banyak masyarakat yang terserap pada pasar tenaga kerja, maka tingkat kemiskinan juga akan turun. Efek buruk dari pengangguran yaitu dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang nantinya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai seseorang. Dengan turunnya kesejahteraan masyarakat akibat menganggur akan meningkatkan peluang terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Dan apabila pengangguran di suatu negara itu buruk, maka akan menimbulkan kekacauan politik dan sosial serta menyebabkan efek buruk bagi kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2010).

Gambar 1.5: **Tingkat Pengangguran Terbuka di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangketosusila Tahun 2006-2015 (Dalam %)**



Sumber: BPS Jawa Timur yang diolah, 2016.

Pada gambar 1.5 menunjukkan Tingkat pengangguran terbuka di Gerbangketosusila selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2006-2015 masih cukup tinggi karena rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Gerbangketosusila masih diatas 4 persen. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka normal di suatu wilayah adalah tidak lebih dari 4 persen. Sedangkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Gerbangketosusila lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka di Jawa timur. Tingkat pengangguran terbuka di Gerbangketosusila bergerak fluktuatif dari tahun 2006-2015. Pada tahun 2006 tingkat pengangguran terbuka sebesar 9.60%, lalu turun pada 5 (lima) tahun selanjutnya dimana pada tahun 2011 tingkat pengangguran sebesar 4.68%. Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 5.43% dan kembali turun pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 4.94% dan 4.71%. Namun di tahun 2015 mengalami kenaikan kembali menjadi 5.29%.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dalam masyarakat bukan hanya masalah statistik atau angka saja, melainkan persoalan nyata yang memperlihatkan sulitnya dan terpuruknya kehidupan rakyat bangsa ini karena kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional dimana berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat mulai dari sosial, ekonomi, budaya dan aspek-aspek lainnya yang harus diatasi agar pembangunan ekonomi berjalan dengan baik sehingga kualitas hidup masyarakat juga berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015 mengalami tren menurun tapi masih diangka yang relatif tinggi, yaitu diatas angka 10%. Kondisi tingkat kemiskinan di daerah Gerbangkertosusila juga masih belum merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinan di Kota/Kabupaten di SWP Gerbangkertosusila juga masih tinggi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sudah banyak tetapi dengan hasil yang belum merata ini membuat masalah kemiskinan masih menjadi persoalan serta PR bagi pemerintah sendiri lebih ketat lagi dalam menangani masalah ini dan membebaskan masyarakat dari jerat lingkaran kemiskinan. Dampak yang diakibatkan kemiskinan sangatlah buruk terhadap perekonomian disuatu wilayah/negara. Oleh karena itu penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan terutama pada daerah SWP Gerbangkertosusila yang peneliti ambil sebagai objek penelitian dimana SWP ini menjadi daerah metropolitan terbesar kedua setelah Jabodetabek yang juga memiliki kegiatan industri manufaktur yang cukup baik di Provinsi Jawa Timur.

SWP Gerbangkertosusila yang menjadi salah satu daerah yang terkonsentrasi di Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang berkegiatan di bidang

industri manufaktur, seharusnya dapat menyumbangkan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan dampak penyerapan tenaga kerja dimana tenaga kerja yang di serap harus memiliki kualitas yang baik yaitu tenaga kerja yang terdidik, dengan adanya tenaga kerja terdidik ini maka kelayakan upah minimum juga harus diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap kebutuhan hidup dan kesejahteraan hidup tenaga kerja yang nantinya akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada dan dapat pula meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kemiskinan yang terjadi bisa berkurang. Berdasarkan hal tersebut yang melatarbelakangi penulis dalam mengambil beberapa variabel penelitian dalam penelitian ini dan tertarik menyusun penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertasusila?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila.
2. Mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila.
3. Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila.
4. Mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau informasi yang berguna dan bermanfaat di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang lebih dominan dan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam mengatasi masalah kemiskinan serta dapat menjadi bahan masukan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam permasalahan kemiskinan di masa yang akan datang.

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi, salah satunya kajian ilmiah lebih lanjut guna memperkaya ilmu terkait masalah pembangunan ekonomi di Jurusan Ilmu Ekonomi. Manfaat khusus bagi ilmu ekonomi, yaitu dapat menambah serta melengkapi kajian-kajian mengenai permasalahan kemiskinan dengan menjabarkan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan tersebut.

3. Manfaat Akademisi

Sebagai sarana pembelajaran dalam menambah wawasan, dan sebagai sumber informasi serta bahan studi bagi peneliti selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti yang lain dengan tema atau topik bahasan yang sama. Dan sekaligus dapat memberikan inspirasi pada peneliti lain yang tertarik pada bidang dan permasalahan yang sama untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori yang relevan digunakan untuk menjelaskan berbagai variabel yang akan diteliti, yaitu variabel kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan, dan pengangguran serta menjelaskan pula bagaimana hubungan antar variabel yang akan diteliti.

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang. Secara umum pengertian kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu permasalahan yang dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat. Selain dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat, kemiskinan juga dapat dilihat secara luas dari sudut pandang baik dari segi sosial maupun budaya dari masyarakat itu sendiri. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering di hadapi oleh masyarakat dimana terdapat kondisi ketidakmampuan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pemenuhan papan, sandang, dan pangan. Fenomena kemiskinan seperti ini sudah biasa terjadi di negara berkembang khususnya di Indonesia, dikarenakan rendahnya penghasilan masyarakat dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) itu sendiri (Aprilia, 2016).

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan

serta ketrampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan tidak yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2010).

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara dan kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Sedangkan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan dari sudut pandang ekonomi atau dengan kata lain, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah standar minimum.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana individu atau rumah tangga berada dalam kondisi kekurangan atau ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, bahkan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kemiskinan juga timbul karena adanya kesulitan untuk mengakses kebutuhan pokok dalam berbagai bidang kehidupan yang dipicu adanya kebijakan pemerintah atau minimnya infrastruktur yang tersedia sehingga kemiskinan merupakan masalah multidimensional, bukan sekedar permasalahan ekonomi

namun juga bersinggungan dengan dimensi non ekonomi seperti kesehatan, sosial, budaya, dan politik (Attibrizi, 2016).

2.1.1.1 Jenis Kemiskinan

Kemiskinan dapat di golongan ke dalam beberapa kategori, yaitu (Trisnanesya, 2016):

1. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural sering disebut sebagai kemiskinan buatan (*man made poverty*). Baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang di terapkan, seperti sistem politik, ekonomi, keamanan, dan lainnya dan oleh karenanya kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi rendah (*under development trap*) atau tidak mungkin sejahtera.

2. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan kategori ini lebih banyak disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kondisi demikian, peluang untuk melakukan dan meningkatkan produksi relatif kecil dan tingkat efisiensi produksinya rendah.

3. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas, tidak mau kerja keras, jadi etos bekerjanya sangat rendah, tidak disiplin dan sebagainya.

4. Kemiskinan absolute

Kemiskinan kategori ini biasanya dipandang dari sisi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum. Biasanya di dasarkan pada sejumlah kebutuhan nutrisi.

5. Kemiskinan relatif

Kemiskinan kategori ini biasanya diperoleh dengan membandingkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi (kelompok bawah dengan kelompok atas).

2.1.1.2 Ukuran Kemiskinan

Untuk menentukan seseorang dalam kategori miskin atau tidak, maka diperlukan patokan khusus yang harus digunakan. Dengan patokan ini maka bisa ditentukan posisi individu atau rumah tangga, apakah berada diatas, ditengah, maupun dibawah potokan tersebut. Patokan inilah yang disebut dengan garis kemiskinan. Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan Maipata (2014) untuk mempermudah menentukan seseorang atau rumah tangga termasuk golongan miskin atau tidak, diperlukan suatu patokan yang di sepakati atau di tetapkan. Berdasarkan patokan inilah dipetakan posisi setiap individu atau rumah tangga, apakah di atas, di bawah, serta seberapa jauh posisinya di atas atau di bawah patokan. Patokan inilah yang disebut dengan Garis Kemiskinan (GK).

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Salah satu penentuan Garis Kemiskinan di Indonesia yaitu yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menggunakan Garis Kemiskinan (GK),

dimana metode ini merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Dengan demikian, garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan, atau secara matematis di tuliskan:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Dimana:

GK : Garis Kemiskinan

GKM : Garis Kemiskinan Makanan

GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan

Seperti yang dapat dilihat dalam laman Badan Pusat Statistik, untuk teknik penghitungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM), tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference populaion*) yaitu 20 persen penduduk

yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Dimana :

GKM_j : Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} : Harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

J : Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

Dimana :

K_{jk} : Kalori dari komoditi k di daerah j

HK_j : Harga rata-rata kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

Dimana :

F_j : Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan

data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

Dimana :

NF_p : Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp).

V_i : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).

i : Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

p : Daerah (perkotaan atau pedesaan).

2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan

Menurut Mahmudi dalam Widodo (2011) dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu:

1. Rendahnya tingkat kesehatan
2. Rendahnya pendapatan
3. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya kemiskinan karena tingkat kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Tingkat produktivitas yang

rendah lebih lanjut menyebabkan pendapatan rendah, dan pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan itu selanjutnya menyebabkan seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan.

Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negara berkembang diakibatkan oleh interaksi 6 karakteristik, yang meliputi:

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonomi tergolong lambat.
2. Pendapatan perkapita negara berkembang masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan beberapa mengalami stagnasi.
3. Distribusi pendapatan sangat timpang.
4. Mayoritas penduduk di negara berkembang hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, banyak masyarakat kekurangan gizi, serta banyaknya wabah penyakit, sehingga tingkat kematian bayi sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju.
6. Fasilitas pendidikan beserta kurikulumnya relatif kurang relevan.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini pertumbuhan ditandai dengan

masuknya dana kedalam sistem ekonomi suatu negara. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya, investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka (Sunusi, 2014).

Menurut Kuznets dalam Todaro (2004), pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas di tentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusi (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Defenisi ini memiliki 3 (tiga) komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi bangsa terlihat dari meningkatnya terus menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhinghan, 2007).

Menurut Todaro (2003), terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1. Akumulasi modal

Yang termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah, peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal terjadi apabila ada sebagian pendapatan pada saat ini yang ditabung kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa mendatang. Adanya investasi harus disertai dengan investasi infrastruktur, yaitu jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, dan fasilitas komunikasi. Investasi dalam pembinaan SDM bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap produktivitas.

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Adanya pertumbuhan penduduk yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya angkatan kerja, maka produktivitas tenaga kerja akan meningkat.

3. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi disebabkan oleh pembaruan cara-cara lama dalam melakukan pekerjaan. Terdapat tiga klasifikasi dalam kemajuan teknologi, yaitu:

- a) Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi ketika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- b) Kemajuan teknologi bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), dengan adanya kemajuan teknologi ini menyebabkan tingkat output lebih tinggi dengan

akumulasi jumlah tenaga kerja atau modal pada tingkat yang sama.

- c) Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi apabila penggunaan teknologi tersebut memungkinkan dalam memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

Tinggi rendahnya suatu pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya ditentukan oleh Produk Domestik Bruto (PDB). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai dan barang jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Menurut BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) disusun dalam dua bentuk yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Yaitu jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

2.1.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. Menurut Kuznet dalam Permana (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan memiliki korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur menurun.

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Dimana kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

2.1.3 Upah Minimum

Upah atau gaji yang diberikan kepada seorang tenaga kerja merupakan penghargaan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Sukirno (2002) upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya. Dalam pengertian teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha.

Definisi upah pada UU No 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut teori upah efisiensi, perusahaan akan beroperasi lebih efisien jika upah berada di atas ekuilibrium, jadi akan lebih menguntungkan jika perusahaan tetap mempertahankan upah tetap tinggi meskipun penawaran tenaga kerja berlebih. Menurut teori upah efisiensi membayar upah yang tinggi mungkin akan menguntungkan perusahaan karena bisa menaikkan efisiensi para pekerja.

Teori upah efisiensi yang dikembangkan oleh Cafferty (1990) dalam Nurtiyas (2016) meramalkan bahwa apabila pekerja dengan mendapatkan upah yang tinggi maka dia dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum hidupnya, sehingga dengan demikian apabila kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi maka pekerja akan berangkat ketempat pekerjaannya dengan tenang, dan bagi pekerja sendiri dia akan memberikan konsentrasi yang penuh dan akan mencurahkan pemikiran dan tenaganya secara maksimal selama dia berada di tempat pekerjaannya. Dampak secara ekonomi yang dimunculkan bagi perusahaan adalah tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan upah yang tinggi maka pekerja pun akan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dengan hasil yang lebih memuaskan sehingga dengan demikian pekerja akan merasa lebih puas dengan hasil pekerjaannya sedangkan bagi perusahaan merasa tidak mengalami

kerugian dengan mempekerjakan tenaga kerja yang terampil dan selalu giat dalam meningkatkan hasil produktivitas kerjanya.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan terendah (minimum) sebagai imbalan dari pengusaha yang diberikan kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8 Tahun 1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap (Pratomo dan Saputra, 2011).

Upah minimum menjadi suatu instrumen kebijakan yang mempertemukan kepentingan pengusaha dalam pengeluaran upah terhadap pekerja secara rasional serta menjamin kepentingan pekerja untuk mendapatkan upah sesuai standar yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di wilayah dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor formal seperti industri manufaktur. Upah minimum sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan pekerja dimana upah ketika upah minimum tinggi maka penerimaan/pemasukan yang diterima oleh pekerja juga tinggi begitu pula sebaliknya.

Tujuan adanya penetapan upah minimum sendiri adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi para pekerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan diharapkan produktivitas pekerja dapat meningkat. Diberlakukannya sistem penetapan upah minimum ini juga untuk mengurangi eksploitasi pada para buruh atau pekerja. Dengan adanya peraturan undang-undang mengenai sistem penetapan upah minimum dari pemerintah, dimaksudkan agar para pekerja dapat terlindungi.

Menurut Prastyo (2010), Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk region atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing Provinsi. Upah minimum ini dapat dibedakan menjadi upah minimum regional dan upah minimum sektoral.

1. Upah Minimum Regional

Upah minimum regional adalah upah bulanan terendah dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu.

2. Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku pada setiap provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektor Regional Tingkat II (UMSR Tk. II).

2.1.3.1 Hubungan Upah Minimum dengan Tingkat Kemiskinan

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menurunkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum. Kemudian menurut Kaufman dalam Prastyo (2010) tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.

Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukan dalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik (Yudha, 2013).

2.1.4 Pendidikan

Pendidikan adalah hal utama yang harus dimiliki oleh setiap negara guna membangun sumber daya manusia yang unggul dan bisa memajukan bangsa. Pendidikan juga mempunyai peran utama dalam usaha menyetarakan antara orang kaya dan miskin atau laki-laki dan perempuan. Jika tidak ada penyetaraan

dalam bidang pendidikan maka akan terjadi pula ketidaksetaraan di bidang-bidang lainnya (Laksono, 2013). Menurut Todaro (2011) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 pengertian Pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, membangun kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Undang – undang inilah yang menjadi dasar berdirinya proses pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 13 juga dijelaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain.

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Jenjang pendidikan formal:
 - a) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

- b) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
 - c) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, *magister*, spesialis, dan *doctor* yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- 2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.
- 3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

2.1.4.1 Hubungan Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan

Hubungan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan sehingga meningkatkan produktivitas seseorang dalam bekerja dan tentu saja berimplikasi pada meningkatnya akses untuk memperoleh kebutuhan layak dan menghindari kemiskinan.

Todaro (2000) dalam Nugroho dan Purwanti (2011) Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada penelitian Siregar dan Wahyuniarti (2008), menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki pengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.1.5 Pengangguran

Menurut Halim (2012) Pengangguran atau tuna karya (*unemployment/jobless*) adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Sedangkan, Badan Pusat Statistik mengartikan pengangguran sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang

mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dalam membedakan pengangguran, Sukirno (1999) dalam Aprillia (2015) membagi pengangguran kedalam dua jenis, yaitu:

1. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dibagi kedalam empat jenis, antara lain:
 - a) Pengangguran Alamiah, yaitu pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95% dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak 5% tersebut yang dimaksud dengan pengangguran alamiah.
 - b) Pengangguran Friksional, adalah suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.
 - c) Pengangguran Struktural, merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini terdapat tiga sumber utama penyebab terjadinya pengangguran struktural yaitu:
 - 1) Perkembangan teknologi. Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan tenaga kerja manusia digantikan oleh teknologi atau mesin. Sehingga, banyak pekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya.

- 2) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain. Persaingan dari negara lain atau wilayah lain yang lebih mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan lebih ekonomis menyebabkan permintaan (*demand*) terhadap barang lokal menurun. Sehingga, industri lokal yang tidak mampu bersaing akan gulung tikar dan menyebabkan pengangguran.
 - 3) Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat dari daerah lain.
 - d) Pengangguran Konjungtur, merupakan pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi, sehingga terjadinya pengangguran dalam permintaan agregat. Adanya penurunan permintaan tersebut mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja, sehingga menyebabkan pengangguran.
2. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya terbagi kedalam empat jenis, antara lain:
- a) Pengangguran Terbuka, pengangguran terbuka terjadi sebagai akibat adanya pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik Pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan

usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan.

- b) Pengangguran Tersembunyi, merupakan keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.
- c) Pengangguran Musiman, adalah pengangguran yang terjadi di masa-masa tertentu dalam satu tahun. Keadaan tersebut dapat terjadi pada sektor pertanian ketika petani menganggur untuk menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dengan musim panen.
- d) Setengah Menganggur adalah keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia jam kerja normal ialah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu termasuk dalam golongan setengah menganggur.

Terjadinya fenomena pengangguran diantaranya adalah: (1) jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia (kesenjangan antara penawaran dan permintaan); (2) kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja; (3) masih adanya anak putus sekolah dan lulus yang tidak terserap di dunia kerja dan berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai; (4) terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global. Dari keempat faktor-faktor tersebut, faktor pertama, kedua, ketiga merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Dari penjelasan diatas, maka perlu dikembangkan program-program khusus dan pelatihan dalam rangka

mempercepat penurunan angka pengangguran (Disnakertrans, 2009 dalam Aprilia, 2016).

2.1.5.1 Hubungan Pengangguran dengan Tingkat Kemiskinan

Menurut Sukirno (2008) dalam Dani (2015), terdapat hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat akan mencapai titik maksimum apabila tingkat pengangguran tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Terjadinya pengangguran akan mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat dan akan berakhir pada kemiskinan.

Selanjutnya menurut Sukirno juga, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu Negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang terkait dengan tema dan variabel yang diteliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan:

Yudha (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka,

Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2011". Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel, data yang digunakan berupa *time series* dengan tahun 2009-2011 dan *cross section* dengan 33 provinsi di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier data panel dengan metode *FEM* dengan menggunakan alat bantu *software Eviews 6*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Khabhibi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011)". Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif serta menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linear berganda dengan uji statistik (uji t, uji F, koefisien determinasi (R^2)) dan asumsi klasik (uji multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan normalitas). Lalu analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 18. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan dengan uji terhadap koefisien regresi secara parsial (uji t) dengan $\alpha = 5\%$ menunjukkan dua variabel

yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Tingkat Pengangguran, berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil Uji F dengan $\alpha = 5\%$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Anjuli dan Fitrayati (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang tahun 2000-2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan metode analisis penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan *software* Eviews 7. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh dan negatif terhadap kemiskinan, variabel Pendidikan tidak berpengaruh dan positif terhadap kemiskinan dan variabel Pengangguran berpengaruh dan positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Sampang. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sampang

Istifaiyah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah

minimum, dan Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertosusila. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis panel data (*pooled data*). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik linier berganda (*multiple regression*) untuk data panel yang mencakup 7 (tujuh) Kota/Kabupaten di Gerbangkertosusila yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan) selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2009-2013 dan sebagai alat pengolahan data menggunakan program Eviews 7. Hasil estimasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum Kota/Kabupaten dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertosusila. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, lalu upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertosusila periode tahun 2009-2013.

Fadilah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur 2009-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2009-2013, antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Upah Minimum dan Pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan spesifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel periode tahun 2009-2013 dengan jumlah observasi sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran berpengaruh

secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dan secara parsial dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 2.1: **Penelitian Terdahulu**

No	Penulis, Judul, dan Tahun	Variabel Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	<p>Penulis : Okta Ryan Pranata Yudha</p> <p>Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011</p> <p>Tahun : 2013</p>	<p>Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan (KMS)</p> <p>Variabel Independen : -Pertumbuhan Ekonomi (PE) Upah Minimum (UM) - Tingkat Pengangguran Terbuka (TP) - Inflasi (I)</p>	<p>Jenis data: Data Sekunder</p> <p>Analisis Data: Analisis data menggunakan analisis regresi linier data panel dengan metode <i>FEM</i> dengan menggunakan alat bantu <i>software Eviews</i> 6</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.</p>
2.	<p>Penulis : Achmad Khabhibi</p>		<p>Jenis data: Data Sekunder</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan variabel</p>

No	Penulis, Judul, dan Tahun	Variabel Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
2.	<p>Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011)</p> <p>Tahun : 2013</p>	<p>Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan (K)</p> <p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi (Y) - Upah Minimum Kabupaten/Kota (U) - Tingkat Pengangguran (P) 	<p>Analisis Data: Analisis data menggunakan Analisis linier berganda dengan bantuan program SPSS 18</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, dan Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.</p>
3.	<p>Penulis : Adecitya Dwi Anjuli dan Dhiah Fitrayati</p> <p>Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang</p> <p>Tahun : 2013</p>	<p>Variabel Dependen : Tingkat Kemiskinan (Y)</p> <p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi (X₁) - Pendidikan (X₂) - Pengangguran (X₃) 	<p>Jenis data: Data Sekunder</p> <p>Analisis Data: Analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan <i>software</i> EvIEWS 7</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh dan negatif terhadap Kemiskinan, Pendidikan tidak berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan, dan Pengangguran berpengaruh dan positif terhadap Kemiskinan.</p>

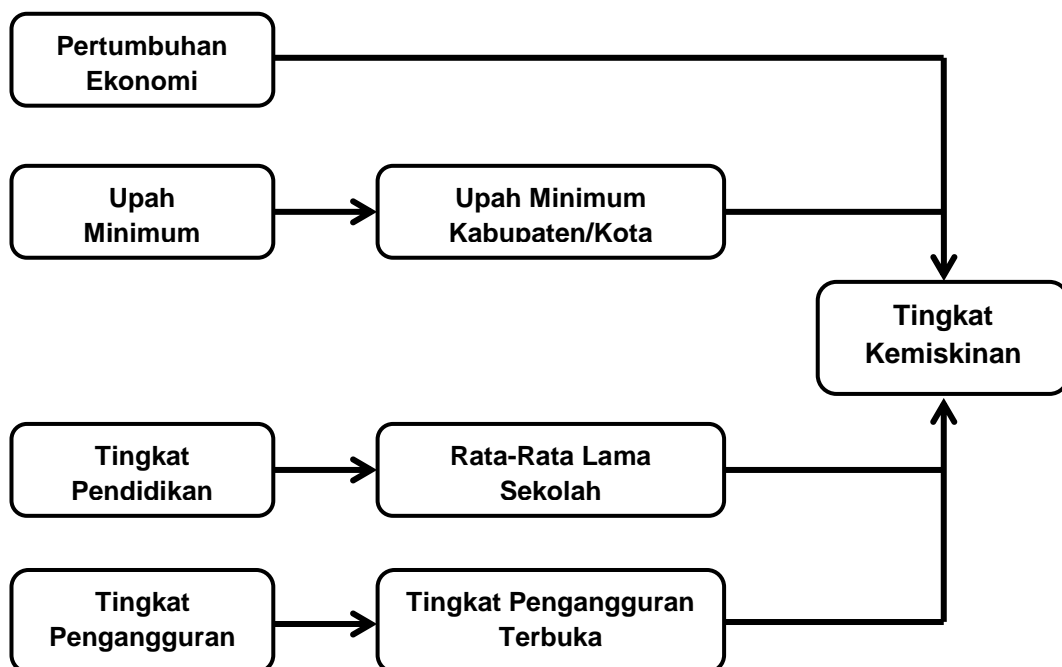
No	Penulis, Judul, dan Tahun	Variabel Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
4.	<p>Penulis : Lailatul Istifaiyah</p> <p>Judul : Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013)</p>	<p>Variabel Dependen : Tingkat Kemiskinan (TK)</p> <p>Variabel Independen : -Pertumbuhan Ekonomi (Y) -Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) -Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</p>	<p>Jenis data: Data Sekunder</p> <p>Analisis Data: Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik linier berganda (<i>multiple regression</i>) untuk data panel menggunakan Eviews 7</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Gerbangkertasusila periode tahun 2009-2013.</p>
5.	<p>Penulis : Fidha Rida Fadilah</p> <p>Judul : Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur 2009-2013</p>	<p>Variabel Dependen : Tingkat Kemiskinan (TK)</p> <p>Variabel Independen : - Pertumbuhan Ekonomi (PE) - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)</p>	<p>Jenis data: Data Sekunder</p> <p>Analisis Data: Analisis data panel menggunakan statistik linier berganda (<i>multiple regression</i>) dengan menggunakan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, variabel Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan,</p>

No	Penulis, Judul, dan Tahun	Variabel Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
5.	Tahun : 2016	- Pendidikan (PD) - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	program Eviews.	dan Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

2.3 Kerangka Pikir

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis:

Gambar 2.1: **Kerangka Pikir**



Sumber : Ilustrasi Penulis, 2017.

Dari ilustrasi kerangka pemikiran pada gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa dengan dibentuknya kawasan kerjasama Gerbangkertosusila adalah untuk pemerataan pembangunan antar daerah yang diharapkan dapat mengentaskan masalah kemiskinan. Untuk mengentaskan masalah kemiskinan dalam penelitian ini ada empat variabel yang menurut peneliti berpengaruh terhadap kemiskinan, sehingga perlu tinjauan lebih lanjut bagaimana kontribusi dari variabel-variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan. Variabel pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting keberhasilan suatu pembangunan, dimana pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan memberikan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang tercantum di penelitian ini, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan. Menurut (Maipita, 2014) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan perkapita, menaikkan permintaan dan penawaran, dan seterusnya berputar mengikuti mekanisme perekonomian.

Variabel yang kedua yaitu upah minimum. Tujuan dari penetapan upah minimum secara makro adalah untuk pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja, perubahan struktur biaya industri sektoral, peningkatan produktivitas kerja nasional, dan memperlancar komunikasi pekerja. Secara lebih spesifik, variabel upah minimum dalam penelitian ini menggunakan upah minimum kabupaten/kota. Penetapan upah minimum yang sesuai dan layak mampu mendorong penduduk memperoleh standar pendapatan yang layak untuk memenuhi kesejahteraan hidup sehingga tingkat kemiskinan akan turun. Dalam penelitian terdahulu Istifaiyah (2015) upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Upah Minimum

Kabupaten/Kota menjadi suatu instrumen yang menjamin para pekerja mendapat upah yang layak dan juga merupakan perlindungan bagi para pekerja agar tidak terjerat dalam kemiskinan.

Variabel yang ketiga yaitu pendidikan. Selain pertumbuhan ekonomi, faktor penting suatu pembangunan ialah pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Dalam pembangunan sumber daya manusia hal yang paling mendasar adalah pendidikan. Dalam penelitian ini indikator variabel pendidikan yang dipakai berupa persentase rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas. Hasil dari penelitian Nugroho dan Purwanti (2011) salah satu indikator pendidikan yaitu berupa rata rata lama sekolah, dimana rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Rata-rata lama sekolah sebagai indikator penting pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dimana semakin tinggi rata rata lama sekolah formal yang dijalani maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Dan yang terakhir variabel keempat yaitu pengangguran. Pengangguran dapat menimbulkan berbagai macam masalah ekonomi dan sosial dimana penduduk tidak dapat memenuhi akses terhadap pendapatan layak dan mendorong pada meningkatnya tingkat kemiskinan. Secara lebih spesifik dalam penelitian ini menggunakan indikator tingkat pengangguran terbuka. Pada penelitian terdahulu Cholili (2014) diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dimana ketika tingkat pengangguran terbuka meningkat maka tingkat kemiskinan juga meningkat. Dari penjelasan variabel-variabel diatas maka diperlukan upaya untuk meningkatkan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan, dan mengurangi tingkat pengangguran guna peningkatan kualitas hidup dari

masyarakat sehingga hidup masyarakat sejahtera yang mana secara tidak langsung juga akan menurunkan tingkat kemiskinan.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H_1 : Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertosusila tahun 2006-2015.
- H_2 : Variabel upah minimum Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertosusila tahun 2006-2015.
- H_3 : Variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertosusila tahun 2006-2015.
- H_4 : Variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertosusila tahun 2006-2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian kuantitatif dipilih karena penelitian ini bermaksud untuk mengetahui besaran nilai dari variabel-variabel (berupa angka) yang ada dalam suatu model matematis yang digunakan. Variabel-variabel tersebut yang diestimasi dalam sebuah model dianalisis dengan alat analisis regresi yang kemudian hasilnya akan dideskripsikan dalam penjabaran kalimat.

Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan dapat diketahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 7 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan. Waktu penelitian ini mengacu pada tahun pengumpulan data yang digunakan selama kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2015.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data kuantitatif. Menurut Kuncoro (2013), data kualitatif merupakan data yang tidak dapat

diukur dalam skala numerik, sedangkan data kuantitatif merupakan data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), dibedakan menjadi data interval sebagai data yang diukur dengan jarak diantara dua titik pada skala yang telah diketahui dan data rasio sebagai data yang diukur dengan suatu proporsi. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu berupa data tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka tiap Kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2006 hingga 2015.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data penelitian yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data panel 7 Kabupaten/Kota di kawasan Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan) selama kurun waktu 10 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2015. Data panel merupakan gabungan antara Data deret waktu (*time-series data*) dan data lintang (*cross-section data*). Data deret waktu (*time-series data*) merupakan data yang biasanya meliputi satu objek/individu tertentu tetapi meliputi beberapa periode waktu. Sedangkan data lintang (*cross-section data*) merupakan data yang terdiri atas beberapa atau banyak objek dengan beberapa jenis data dalam suatu periode waktu tertentu.

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Kuncoro (2013) pengumpulan data diperlukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti karena kelengkapan data mempengaruhi kualitas analisis yang digunakan dalam ketepatan keputusan yang akan diambil. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Data diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi melalui pendalaman literatur-literatur yang berkaitan dengan objek studi yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka dari berbagai literatur karya ilmiah, majalah dan buku yang menyangkut teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek studi. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai artikel, media cetak, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian untuk dijadikan referensi sesuai masalah yang diteliti yaitu tentang kemiskinan.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan konsep yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai fenomena yang diteliti (Wardana, 2012). Pada penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*).

a. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi (respon) atau variabel yang nilainya tergantung oleh perubahan variabel lain (Wijaya, 2013). Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini yaitu Tingkat Kemiskinan di Gerbangkertosusila.

b. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi (stimulus) atau variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel bebas (independen) pada penelitian ini menggunakan 4 variabel antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran di Gerbangkertosusila.

Selanjutnya akan dijabarkan definisi operasional tiap variabel dalam penelitian. Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka dirumuskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan (POV) dalam penelitian ini mengacu pada jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Artinya penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan, maka penduduk tersebut tergolong dalam penduduk miskin, dan sebaliknya. Data tingkat kemiskinan dalam penelitian ini adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Gerbangkertosusila tahun 2006-2015 yang diukur dalam satuan persen.
2. Pertumbuhan Ekonomi (GRO) merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam kenaikan

pendapatan nasional. Sedangkan PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Data pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar harga konstan di masing masing Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila tahun 2006-2015 yang diukur dalam satuan persen.

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (WAG) adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota yang diterima oleh pekerja per bulan. UMK yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila tahun 2006-2015 yang diukur dalam satuan rupiah.
4. Tingkat Pendidikan (EDU) dinyatakan sebagai rata-rata lama sekolah, dimana rata-rata lama sekolah adalah nilai rata-rata bagi tiap penduduk berumur 15 tahun ke atas dalam menempuh seluruh jenjang pendidikan formal di masing-masing Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila tahun 2006-2015 yang diukur dalam satuan tahun.
5. Pengangguran (UNP) adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapat pekerjaan tetapi belum mendapat pekerjaan. Data pengangguran dalam penelitian adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka adalah presentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di masing-masing Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila tahun 2006-2015 yang diukur dalam satuan persen.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel (*pooled data*) serta menggunakan alat pengolahan data berupa program aplikasi *Eviews 9*. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan deret lintang (*cross-section data*). Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dan *time series* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i : i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross-section*

Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t : t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana T adalah banyaknya data *time-series*

Mengingat data panel merupakan gabungan data dari data *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

3.6 Regresi Linier Berganda Untuk Data Panel

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Dalam penelitian ini yang termasuk data *time series* adalah data dari tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka tahun 2006-2015, sedangkan yang merupakan data *cross section* adalah 7 Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data panel menggunakan statistik linier berganda (*multiple regression*). Teknik ini bertujuan menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi (GRO), upah minimum (WAG), tingkat pendidikan (EDU), dan tingkat pengangguran (UNP) terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan (POV). Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda untuk penelitian ini sebagai berikut:

$$POV_{it} = \alpha + \beta_1 GRO_{it} + \beta_2 WAG_{it} + \beta_3 EDU_{it} + \beta_4 UNP_{it} + \mu_{it} \dots (3.4)$$

Dimana:

POV = Tingkat kemiskinan di Gerbangkertosusila

GRO = Pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertosusila

WAG = Upah minimum Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila

EDU = Tingkat Pendidikan (lama sekolah) di Gerbangkertosusila

UNP = Tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertosusila

α = Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi variabel bebas

μ_{it} = Komponen *error* di waktu *t* untuk unit *cross section* *i*

i = *cross-section* : 1, 2, 3, ..., 7 (Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila)

t = *time series* : 1, 2, 3, ..., 10 (tahun 2006-2015)

3.7 Metode Estimasi Model Regresi Data Panel

Menurut Widarjono (2009) dalam Satria (2015) menyatakan dalam analisis model data panel dikenal tiga macam pendekatan yang terdiri dari *pooled least square (common effect)*, pendekatan tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Ketiga pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Pooled Least Square (Common Effect)*

Model *common effect* menggabungkan data *cross section* dengan *time series* dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut (Widarjono, 2009 dalam Satria, 2015). Model ini merupakan model paling sederhana dibandingkan dengan kedua model lainnya. Model ini tidak dapat membedakan varians antara silang tempat dan titik waktu karena memiliki *intercept* yang tetap, dan bukan bervariasi secara *random* (Kuncoro, 2012 dalam Satria, 2015).

2. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Pengertian model *fixed effect* adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek (*cross section*), tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 2012 dalam Satria, 2015). Model ini mengasumsikan bahwa intercept adalah berbeda setiap subjek sedangkan slope tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel dummy (Kuncoro, 2012 dalam Satria, 2015). Model ini sering disebut dengan model *Least Square Dummy Variables* (LSDV).

3. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*)

Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk residual (Kuncoro, 2012 dalam Satria, 2015). Model ini mengestimasi data panel

yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Widarjono (2009) dalam Satria (2015) model *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang menggunakan variabel dummy. Metode analisis data panel dengan model *random effect* harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah cross section harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian.

3.8 Uji Penentuan Model

Dalam penentuan model terbaik antara *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* menggunakan dua teknik estimasi model. Tiga teknik ini digunakan dalam regresi data panel untuk memperoleh model yang tepat dalam mengestimasi regresi data panel. Pertama *Chow test* digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau *fixed effect*. Kedua, *Hausman test* digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau *random effect*. Dan ketiga, *Lagrange Multiplier Effect Test* digunakan untuk memilih antara model *random effect* atau *common effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel.

1. Chow Test

Chow test merupakan uji untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect* (Widarjono, 2009 dalam Satria, 2015). *Chow test* dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews*. Hipotesis yang dibentuk dalam *Chow test* adalah sebagai berikut :

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

H_0 ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 5%.

2. Hausman Test

Pengujian ini membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect* dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012 dalam Satria, 2015). Hausman *test* menggunakan program yang serupa dengan Chow *test* yaitu program *Eviews*. Hipotesis yang dibentuk dalam Hausman *test* adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

H_0 ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 5%.

3. Lagrange Multiplier Effect Test

Menurut Widarjono (2007) dalam Fadilah (2016), untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari model *Common Effect* digunakan *Lagrange Multiplier* (LM). Uji Signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode *Common Effect*. LM *test* juga menggunakan program yang serupa dengan Chow *test* dan Hausman *test* yaitu program *Eviews*. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang dibentuk dalam LM *test* sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Random Effect*

Rule of thumb:

Prob. BP (Both) < α : menolak H_0

Prob. BP (Both) > α : menerima H_0

H_0 ditolak jika nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares*. Dan sebaliknya H_0 diterima jika nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Square*.

3.9 Uji Statistik

Dalam uji kriteria statistik dilakukan dengan tiga pengujian, yaitu uji parsial (Uji t), uji simultan (Uji F), dan uji koefisien determinasi (Uji R^2).

3.9.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Uji t ini dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Jika t-hitung $>$ t-tabel, maka hipotesis alternatif (H_1) dapat diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Apabila t-hitung $<$ t-tabel, maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. Cara lain untuk melihat nilai t- hitung dapat dilihat dari nilai signifikansi atau probabilitas. Apabila nilai sig $<$ 0,05, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 begitu pula sebaliknya. Hipotesa nol (H_0) akan diterima atau ditolak. Jika nilai probabilitas $<$ α (5%=0,05) maka H_0 ditolak atau variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya jika nilai probabilitas $>$ α (5%=0,05)) maka H_0 diterima atau variabel independen tersebut berpengaruh akan tetapi tidak signifikan terhadap variabel dependen.

3.9.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F-statistik digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F hitung dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Apabila Nilai probabilitas F hitung yang lebih kecil

dari 0,05 ($\alpha=5\%$) maka variabel independen dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Namun, jika nilai probabilitas F lebih besar 0,05 ($\alpha=5\%$), maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen (Nabila, 2015).

3.9.3 Uji Koefisiensi determinasi (Uji R^2)

Suatu model mempunyai kebaikan dan kelemahan dan untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) digunakan koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi menunjukkan variasi turunya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Bila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati angka 1, maka variabel independen makin mendekati hubungan dengan variabel dependen sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut dapat dibenarkan (Gujarati, 2003).

Nilai koefisien determinan (R^2) adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinan yang mendekati 0 (nol) berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinan yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen hampir memberikan informasi yang dijelaskan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* (R^2) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila

Jawa timur merupakan salah satu Provinsi yang besar dan luas wilayah daratan mencapai 47.130,50 Km² dan luas wilayah lautnya mencapai 110.000 Km². Besarnya wilayah membuat pemerintah Provinsi melakukan penataan serta mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang usaha ini pemerintah mengeluarkan Perda No. 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) adalah suatu wilayah dengan satu dan atau semua kabupaten/kota-perkotaan yang didalamnya mempunyai hubungan hirarki yang terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan atau yang terikat oleh sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa salah satu wilayah pembangunan yang ada di Jawa Timur adalah SWP I Gerbangkertosusila yang merupakan sebuah akronim dari kumpulan beberapa kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur yang di dalamnya terdiri dari 7 Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Pembentukan Satuan wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila sendiri, menurut Perda Provinsi Jawa Timur No.4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur dan PP No.47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Nasional, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar Daerah. Wilayah Gerbangkertosusila merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek dan Kota Surabaya yang terpilih menjadi pusat pada SWP Gerbangkertosusila. .

Kabupaten/Kota yang tergabung dalam SWP Gerbangkertosusila mencakup 7 (tujuh) wilayah administrasi, dimana 6 kabupaten/kota berada di wilayah Pulau Jawa, sedangkan 1 wilayah administrasi berada di Pulau Madura. Ruang Wilayah Gerbangkertosusila adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Laut Jawa
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Selat Madura
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Kabupaten Jombang
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang

Untuk lebih jelas maka akan diuraikan secara umum karakteristik masing-masing kabupaten/kota. Pertama Kabupaten Gresik, wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Kedua Kabupaten Bangkalan, dimana kabupaten ini berada di paling Barat Pulau Madura lebih memilki banyak wilayah pantai daripada wilayah lainnya. Kabupaten Bangkalan merupakan akses paling mudah ditempuh menggunakan jalur laut dengan Kapal Ferry maupun jalur darat dengan Jembatan Suramadu. Ketiga Kabupaten Mojokerto, Kabupaten ini secara geografis tidak berbatasan dengan pantai, hanya berbatasan dengan wilayah Kabupaten lainnya. Disamping itu wilayah Kabupaten Mojokerto juga mengitari wilayah Kota Mojokerto sebagai Kota keempat yang menyandang predikat

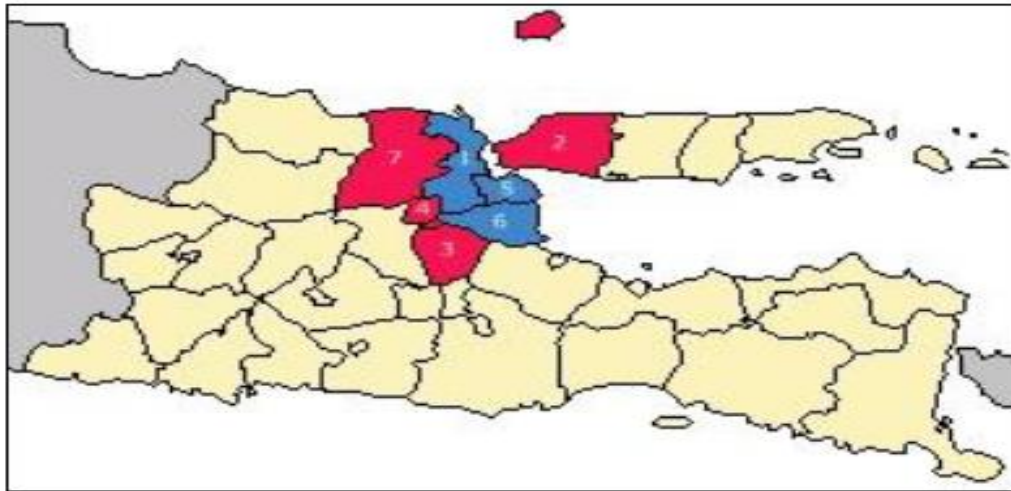
kawasan pemerintahan dengan luas lahan tersempit sekaligus terpadat di Indonesia yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto.

Selanjutnya wilayah kelima yaitu Kota Surabaya sebagai pusat pelayanan GKS berjenis Kota pantai dengan wilayah dataran rendah antara 3-6 m di atas permukaan laut. Daerah berbukit, di Surabaya bagian selatan 20-30 m di atas permukaan laut. Lalu wilayah keenam yaitu Kabupaten Sidoarjo terletak diketinggian 3-10 m yang berada dibagian tengah dan berair tawar, 29,99 persen bertinggian 0-3 meter berada disebelah timur dan merupakan daerah pantai dan pertambakan, 29,20 persen terletak diketinggian 10-25 meter berada dibagian barat.

Ketujuh serta kabupaten terakhir yang masuk dalam wilayah Gerbangkertosusila paling Utara yakni Kabupaten Lamongan. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km², apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut.

Selanjutnya untuk melengkapi dan mengetahui letak pasti masing-masing kabupaten, dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Kabupaten Gresik | 5 Kota Surabaya |
| 2 Kabupaten Bangkalan | 6 Kabupaten Sidoarjo |
| 3 Kabupaten Mojokerto | 7 Kabupaten Lamongan |
| 4 Kota Mojokerto | |

Gambar 4.1: **Peta Wilayah Gerbangkertosusila**

Sumber : Wikipedia, 2017.

Total luas wilayah Gerbangkertosusila mencapai $\pm 5.925.843 \text{ km}^2$ dengan Kabupaten Lamongan yang memiliki luas wilayah terbesar, sedangkan wilayah administrasi paling kecil berada di Kota Mojokerto dengan luas wilayah $\pm 16,46 \text{ km}^2$. Selengkapnya wilayah administrasi yang masuk dalam lingkup Gerbangkertosusila sebagai berikut:

Tabel 4.1: **Luas Wilayah dan Jumlah Kepadatan Wilayah (/Km²)**

No	Daerah Administratif	Luas (Km ²) 2010	Jumlah Penduduk 2010	Kepadatan Penduduk (/Km ²) 2010
1	Kabupaten Gresik	1.192	1.177.042	987,45
2	Kabupaten Bangkalan	1.144	906.761	792,62
3	Kabupaten Mojokerto	835,93	1.025.443	1.226,71
4	Kota Mojokerto	16,46	120.196	7.302,3
5	Kota Surabaya	333,063	2.765.487	8.303,19
6	Kabupaten Sidoarjo	591,59	1.941.497	3.281,83
7	Kabupaten Lamongan	1.812,80	1.179.059	650,4
Total		5.925,843	9.115.485	1,538.3

Sumber: Badan Pusat Statistik RI yang diolah, 2011.

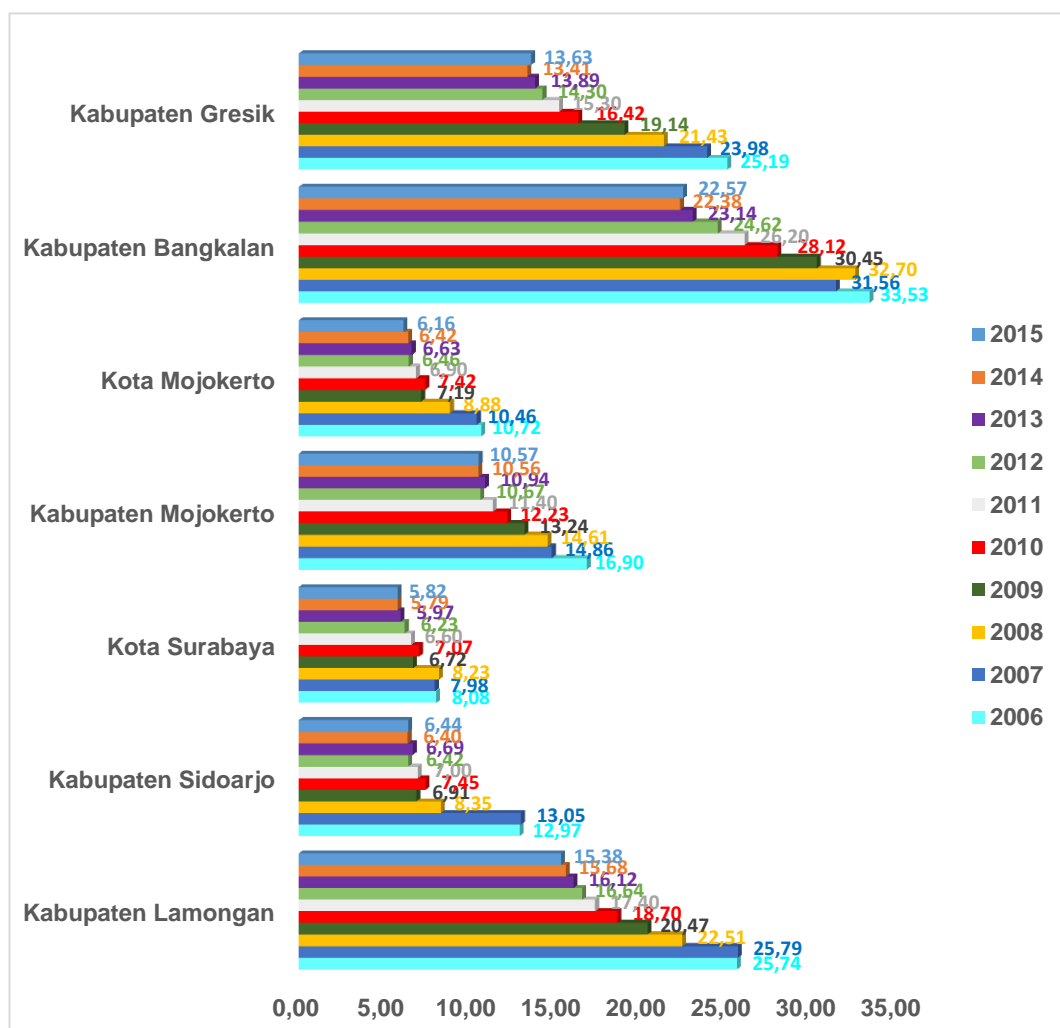
4.2 Tinjauan Tingkat Kemiskinan di Gerbangkertosusila

Tingkat Kemiskinan dalam penelitian ini mengacu pada presentase penduduk miskin, yang dimaksud penduduk miskin ialah merupakan kelompok penduduk yang berada dibawah garis kamiskinan, atau penduduk yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Angka Kemiskinan merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan khususnya terkait pengentasan kemiskinan sebagai refleksi keberhasilan melaksanakan pembangunan yang inklusif. Jika tingkat penduduk miskin tinggi maka menggambarkan bahwa kinerja pembangunan suatu daerah masih belum optimal dan tepat sasaran sedangkan sebaliknya ketika tingkat penduduk miskin rendah maka menggambarkan bahwa kinerja pembangunan suatu daerah telah bergerak menuju kearah yang positif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data tingkat kemiskinan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 dalam bentuk persentase.

Dapat dilihat pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, dari tahun 2006 hingga tahun 2015 presentase penduduk miskin di SWP Gerbangkertosusila masih belum merata dan sebagian besar tingkat kemiskinannya juga masih tinggi. Pada tahun 2006 untuk presentase penduduk miskin tertinggi yaitu berada pada daerah Kabupaten Bangkalan sebesar 33.53%, sedangkan untuk presentase penduduk miskin terendah yaitu berada pada daerah Kota Surabaya sebesar 8.08%. Sementara pada tahun 2015 presentase penduduk miskin tertinggi yaitu tetap di daerah Kabupaten Bangkalan sebesar 22.57%, sedangkan untuk presentase penduduk miskin terendah juga masih di daerah Kota Surabaya dengan nilai sebesar 5.82%. Meskipun dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun presentase penduduk miskin di SWP Gerbangkertosusila mengalami penurunan, namun tren yang ditunjukkan di

semua wilayah Gerangkertosusila justru bergerak fluktuatif diantaranya adalah Kabupaten Gresik pada tahun 2014 mengalami penurunan angka kemiskinan sebesar 13.41% dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 13.63%. Lalu pada daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengalami tren fluktuatif cukup banyak dibanding daerah lain yaitu mengalami kenaikan angka kemiskinan pada beberapa tahun yaitu pada tahun 2007 sebesar 13.05%, tahun 2010 sebesar 7.45%, tahun 2013 sebesar 6.69%, lalu pada tahun 2015 sebesar 6.44% dimana pada tahun 2014 angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 6.40%.

Gambar 4.2: **Presentase Penduduk Miskin Tahun 2006-2015 di Gerbangkertosusila**

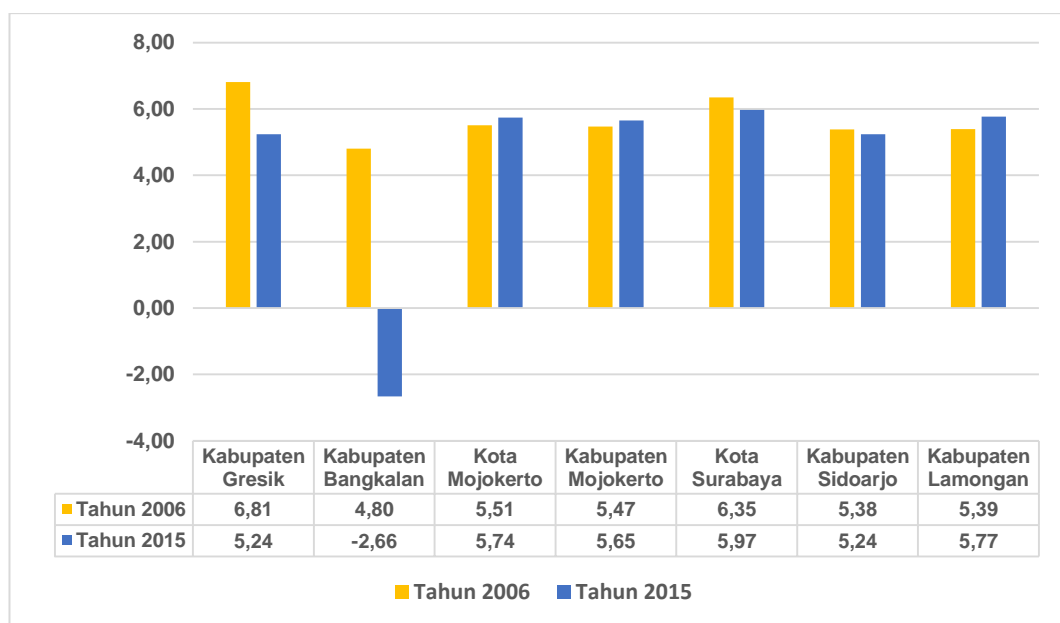


Sumber: BPS Jawa Timur, Data diolah (2016)

4.3 Tinjauan Pertumbuhan Ekonomi di Gerbangkertosusila

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari sebuah pembangunan suatu negara, bahkan bisa dikatakan merupakan salah satu indikator penting untuk menjelaskan kinerja pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan perkapita riil dalam jangka panjang pada suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentunya juga akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka kapasitas produksi akan meningkat, dan kebutuhan akan tenaga kerja dalam suatu wilayah juga meningkat, sehingga pendapatan para penduduk juga akan meningkat, dan pada akhirnya penduduk akan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan terlepas dari persoalan kemiskinan.

Gambar 4.3: **Laju Pertumbuhan Ekonomi di Gerbangkertosusila Tahun 2006 dan 2015 (Persen)**



Sumber: BPS Jawa Timur, Data diolah (2016)

Berdasarkan gambar 4.3 tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang berada di Gerbangkertosusila dari tahun 2006 ke tahun 2015 mengalami peningkatan dan penurunan pada beberapa daerah. Untuk kabupaten/kota yang

mengalami peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2006 ke tahun 2015 diantaranya yaitu Kota Mojokerto dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.51% pada tahun 2006 dan 5.74% pada tahun 2015. Kemudian Kabupaten Mojokerto dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.47% pada tahun 2006 dan 5.65% pada tahun 2015. Serta Kabupaten Lamongan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.39% pada tahun 2006 dan 5.77% pada tahun 2015.

Selanjutnya untuk kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila yang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2006 ke tahun 2015 diantaranya yaitu Kabupaen Gresik dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.81% pada tahun 2006 dan 5.24% pada tahun 2015. Kemudian Kota Surabaya dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.35% pada tahun 2006 dan 5.97% pada tahun 2015 . Lalu Kabupaten Sidoarjo dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5.38% pada tahun 2006 dan 5.24% pada tahun 2015. Serta Kabupaten Bangkalan dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah sebesar 4.80% pada tahun 2006 dan -2.66% pada tahun 2015.

4.4 Tinjauan Upah Minimum di Gerbangkertosusila

Upah minimum merupakan upah terendah yang diterima oleh pekerja/buruh yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Menurut Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pemerintah dalam menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak bagi para pekerja perlu mempertimbangkan beberapa hal diantaranya peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian. Penetapan upah minimum pada dasarnya digunakan sebagai pengaman agar para pekerja tidak dieksploitasi dalam bekerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data upah minimum kabupaten/kota dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 dalam bentuk Rupiah (Rp).

Tabel 4.2: Upah Minimum Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan Gerbangkertosusila Tahun 2006 dan 2015 (Dalam Rp)

No	Daerah	Tahun	
		2006	2015
1.	Kabupaten Gresik	665.200	2.707.500
2.	Kabupaten Bangkalan	550.000	1.267.300
3.	Kota Mojokerto	565.000	1.437.000
4.	Kabupaten Mojokerto	655.200	2.695.000
5.	Kota Surabaya	655.500	2.710.000
6.	Kabupaten Sidoarjo	655.200	2.705.000
7.	Kabupaten Lamongan	558.000	1.410.000

Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang diolah, 2016.

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa dalam kurun 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2006 hingga tahun 2015, upah minimum Kabupaten/Kota di kawasan Gerbangkertosusila terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Upah minimum Kabupaten/Kota dengan nilai upah tertinggi pada tahun 2015 adalah Kota Surabaya dengan upah minimum sebesar Rp.2.710.000. Ini disebabkan karena Kota Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, dimana biaya hidup yang tinggi membuat tingkat upah minimum juga lebih tinggi dibandingkan

daerah lainnya. Selanjutnya diikuti oleh daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp.2.707.500, Kabupaten Sidoarjo Rp.2.705.000 dan Kabupaten Mojokerto sebesar Rp.2.695.000. Sedangkan untuk upah minimum Kabupaten/Kota terendah pada tahun 2015 adalah Kabupaten Bangkalan yang hanya mencapai angka Rp.1.000.000 yaitu sebesar Rp.1.267.300.

4.5 Tinjauan Tingkat Pendidikan di Gerbangkertosusila

Rata-rata lama sekolah menginditifikasi makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tingginya rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah menetapkan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP.

Todaro (2000) dalam Nugroho dan Purwanti (2011) menyatakan bahwa untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Hal ini menggambarkan seberapa baik kualitas pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah.

Tabel 4.3 menunjukkan rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota untuk penduduk usia 15 tahun ke atas di kawasan Gerbangkertosusila selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun pada tahun 2006-2015 menunjukkan kenaikan. Daerah dengan kenaikan tertinggi terdapat pada daerah Kabupaten Sidoarjo dan

Kabupaten Gresik yaitu dengan nilai 0.97 tahun dan 0.91 tahun. Pada tahun 2015 untuk daerah dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar 10.54 tahun yang setara dengan kelas 1 tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk daerah yang mengenyam pendidikan formal 10 tahun yang setara dengan kelas 1 tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) selanjutnya adalah Kabupaten Sidoarjo sebesar 10.46 tahun dan Kota Mojokerto sebesar 10.10 tahun. Sedangkan untuk daerah dengan tingkat rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas terendah adalah Kabupaten Bangkalan sebesar 5.79 tahun yang setara dengan kelas 6 ditingkat Sekolah Dasar.

Tabel 4.3: **Rata – Rata Lama Sekolah di Gerbangkertasusila Tahun 2006 dan 2015 (Dalam Tahun)**

No	Daerah	Tahun	
		2006	2015
1.	Kabupaten Gresik	8.40	9.31
2.	Kabupaten Bangkalan	5.00	5.79
3.	Kota Mojokerto	9.48	10.10
4.	Kabupaten Mojokerto	7.17	8.19
5.	Kota Surabaya	9.72	10.54
6.	Kabupaten Sidoarjo	9.49	10.46
7.	Kabupaten Lamongan	6.76	7.61

Sumber: BPS Jawa Timur yang diolah, 2015.

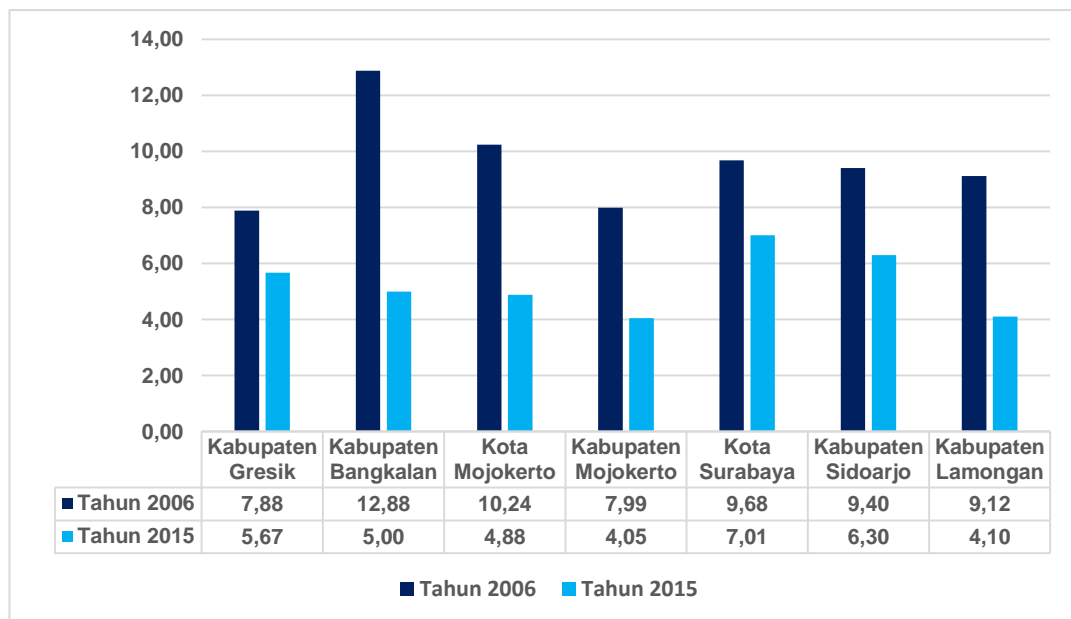
4.6 Tinjauan Tingkat Pengangguran di Gerbangkertosusila

Pengangguran di Indonesia merupakan masalah ketenagakerjaan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat

kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Tingkat pengangguran yang semakin tinggi akan menghambat pembangunan yang telah dilaksanakan dalam usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Jumlah pengangguran bertambah pesat dikarenakan semakin tinggi pertambahan tenaga kerja baru namun tidak diimbangi oleh pertambahan kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru.

Gambar 4.4: Tingkat Pengangguran Terbuka di Gerbangkertosusila Tahun 2006 dan 2015 (Persen)



Sumber: BPS Jawa Timur yang diolah, 2015.

Dari gambar 4.4 menunjukkan bahwa dalam kurun 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2006 ke tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di kawasan Gerbangkertosusila mengalami penurunan. Untuk daerah yang mengalami tingkat penurunan pengangguran cukup besar dari tahun 2006 ke

tahun 2015 adalah Kabupaten Bangkalan yaitu 7.88% dan Kota Mojokerto yaitu 5.36%. Selanjutnya untuk tingkat pengangguran terbuka tertinggi Kabupaten/Kota di kawasan Gerbangkertosusila pada tahun 2015 adalah daerah Kota Surabaya yaitu sebesar 7.01% dan Kabupaten Sidoarjo sebesar 6.30%. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terendah Kabupaten/Kota di kawasan Gerbangkertosusila pada tahun 2015 adalah daerah Kabupaten Mojokerto yaitu 4.05% dan Kabupaten Lamongan sebesar 4.10%.

4.7 Hasil Pengujian Statistik

Seperti yang sudah dijabarkan pada bab metode penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel ini akan dianalisis dengan 3 metode yaitu metode *Pooled Least Square (Common Effect)*, Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*), Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*). Untuk pemilihan metode yang terbaik untuk memperoleh model dalam mengestimasi regresi data panel dilakukan dengan menggunakan beberapa uji yaitu Chow Test, Hausman Test dan Lagrange Multiplier Effect Test. Analisis regresi pada bagian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis penelitian mengenai pengaruh hubungan antara variabel terikat (*dependent variable*) dengan variabel bebas (*independent variable*) yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila.

4.7.1 Pemilihan Model Regresi Panel

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan metode *Pooled Least Square (Common Effect)*, Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*), Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*) dan setelah itu diuji dengan Chow Test, Hausman Test dan Lagrange Multiplier Effect Test maka mendapatkan hasil seperti pada

tabel dibawah ini. Dari tabel dibawah dapat dijelaskan bahwa hasil Chow Test nilai Sig atau Cross-section F adalah 0,000 dengan $\alpha = 5\%$ (0.05), nilai sig $0.0000 < 0.05$ maka menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga data panel yang digunakan lebih baik menggunakan Model *Fixed Effect* dibandingkan menggunakan Model *Common Effect*. Selanjutnya hasil dari Hausman Test nilai sig atau *Cross-section random* adalah 0,2870 dengan $\alpha = 5\%$ (0.05) maka menerima H_0 dan tidak menolak H_1 . Sehingga data panel yang digunakan lebih baik menggunakan Model *Random Effect* dibandingkan menggunakan Model *Fixed Effect*. Dan untuk hasil Lagrange Multiplier Effect Test nilai sig atau *Cross-section random* adalah 0,0000 dengan $\alpha = 5\%$ (0.05) maka menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga data panel yang digunakan lebih baik menggunakan Model *Random Effect* dibandingkan menggunakan Model *Common Effect*. Maka dapat disimpulkan bahwa Model *Random Effect* adalah model yang cocok dengan data yang digunakan.

Tabel 4.4: **Hasil Pemilihan Model Regresi Panel**

Uji	Hipotesis	Nilai Sig	Kesimpulan
Chow Test	H_0 : Model Common Effect H_1 : Model Fixed Effect	0.0000	Model Fixed Effect
Hausman Test	H_0 : Model Random Effect H_1 : Model Fixed Effect	0.2870	Model Random Effect
Lagrange Multiplier Effect Test	H_0 : Model Common Effect H_1 : Model Random Effect	0.0000	Model Random Effect

Sumber : Eviews 9, data diolah (2017)

4.8 Hasil Uji Regresi Data Panel

Dari hasil uji pemilihan model regresi data panel yaitu Chow Test, Hausman Test dan Lagrange Multiplier Effect Test, memberikan hasil bahwa model yang tepat digunakan dalam data panel adalah Random Effect Model

(Pendekatan Efek Acak). Sehingga selanjutnya hasil pengujian regresi data panel dengan model Random Effect untuk mengetahui pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi (GRO), Upah Minimum (WAG), Rata-rata Lama Sekolah (EDU) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (UNP) terhadap Tingkat Kemiskinan (POV) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5: Hasil Regresi

Dependent Variable: POV
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/22/17 Time: 14:42
 Sample: 2006 2015
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 70
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GRO	-0.011635	0.025546	-0.455462	0.6503
WAG	-0.166705	0.052881	-3.152459	0.0024
EDU	-1.852709	0.322430	-5.746078	0.0000
UNP	0.164868	0.054058	3.049860	0.0033
C	8.449064	0.773172	10.92779	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.236013	0.8500
Idiosyncratic random			0.099132	0.1500
Weighted Statistics				
R-squared	0.776079	Mean dependent var		0.331485
Adjusted R-squared	0.762299	S.D. dependent var		0.204891
S.E. of regression	0.099894	Sum squared resid		0.648619
F-statistic	56.32011	Durbin-Watson stat		0.986090
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.785198	Mean dependent var		2.517571
Sum squared resid	4.261268	Durbin-Watson stat		0.150096

Sumber : Eviews 9, data diolah (2017)

Hasil penelitian yang didapat dari persamaan regresi yang dapat menjelaskan bagaimana bentuk pengaruh dari masing-masing variabel bebas

(*independent variable*) yaitu Pertumbuhan Ekonomi (GRO), Upah Minimum (WAG), Rata-rata Lama Sekolah (EDU) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (UNP) pada variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Tingkat Kemiskinan (POV) di SWP Gerbangkertosusila Tahun 2006-2013 jika dimasukkan kedalam model maka persamaan regresi yang diperoleh dari hasil di atas adalah sebagai berikut:

$$\text{POV} = 8.449064 - 0.011635 \text{ GRO} - 0.166705 \text{ WAG} - 1.852709 \text{ EDU} + 0.164868 \text{ UNP}$$

Hasil dari persamaan regresi linier berganda tersebut memberikan pengertian sebagai berikut:

a) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (GRO)

Variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini memiliki koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar 0.011635 dimana menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di SWP Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila sebesar 0.011635%.

b) Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (WAG)

Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dalam penelitian ini memiliki koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar 0.166705 dimana menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 1%, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di SWP Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila sebesar 0.166705%.

c) Variabel Rata-rata Lama Sekolah (EDU)

Variabel Rata-rata Lama Sekolah dalam penelitian ini memiliki koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar 1.852709 dimana menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada variabel Rata-rata Lama Sekolah

sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di SWP Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila sebesar 1.852709%.

d) Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (UNP)

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam penelitian ini memiliki koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0.164868 dimana menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di SWP Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila sebesar 0.164868%.

4.9 Hasil Pengujian Signifikansi

4.9.1 Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil regresi data panel diatas, uji signifikansi secara parsial (uji t) dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% menunjukkan bahwa dari variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (GRO), Upah Minimum (WAG), Rata-rata Lama Sekolah (EDU) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (UNP) yang mempengaruhi variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan (POV) di SWP Gerbangkertosusila, dijelaskan sebagai berikut:

a) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (GRO)

Variabel Pertumbuhan ekonomi (GRO) dengan nilai signifikansi 0.6503 (lebih besar dari α (alpha) 5% atau 0,05) yang berarti bahwa secara parsial atau individual variabel Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila.

b) Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (WAG)

Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan nilai signifikansi 0.0024 (lebih kecil dari α (alpha) 5% atau 0,05) yang berarti bahwa variabel Upah

Minimum berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel variabel tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila.

c) Variabel Rata-rata Lama Sekolah (EDU)

Variabel Rata-rata Lama Sekolah dengan nilai signifikansi 0.0000 (lebih kecil dari α (alpha) 5% atau 0,05) yang berarti bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel variabel tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila.

d) Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (UNP)

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka dengan nilai signifikansi 0.0033 (lebih kecil dari α (alpha) 5% atau 0,05) yang berarti bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan positif terhadap variabel variabel tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila.

4.9.2 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian uji simultan (uji F) bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (GRO), Upah Minimum (WAG), Rata-rata Lama Sekolah (EDU) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (UNP) terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan (POV) di SWP Gerbangkertosusila secara simultan (serentak atau bersama-sama). Berdasarkan hasil didapatkan F hitung sebesar 56.32011 signifikansi sebesar 0,000. Nilai Sig F (0,000) yang lebih kecil dari 5% (0,050) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Rata-rata Lama Sekolah dan Tingkat Pengangguran Terbuka mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan.

4.9.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y),

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Menurut Ghozali (2006), kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap penambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan nilai *adjusted R Square* untuk mengevaluasi model regresi terbaik.

Berdasarkan hasil dapat diketahui nilai *adjusted R Square* sebesar 0.767 atau 76,2%. Artinya kontribusi terhadap variabel Kemiskinan dijelaskan sebesar 76,2% oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Rata-rata Lama Sekolah dan Tingkat Pengangguran Terbuka serta pengaruh random dari masing-masing kota. Sedangkan kontribusi pengaruh terhadap variabel Kemiskinan lainnya sebesar 23.8% dijelaskan oleh variabel lain atau variabel independen di luar persamaan regresi.

4.10 Pembahasan dan Analisis Hasil Regresi

4.10.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh hasil bahwa koefisien dari variabel pertumbuhan ekonomi bertanda negatif dengan nilai sebesar -0.011635 dan nilai signifikansi sebesar 0.6503 (lebih besar dari α (alpha) 5% atau 0,05). Artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Hasil ini tidak sesuai dengan pendapat Kuznet dalam Permana (2012) yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan memiliki korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat

kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur menurun.

Menurut Siregar (2006) dalam Siregar dan Wahyuniarti (2008) Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dimana untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Syarat kecukupan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut haruslah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk bagi golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintahan yang cukup efektif mendistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.

Jika dilihat kondisi perekonomian nasional dapat dikatakan kurang baik, perlambatan laju ekonomi yang terjadi pada tahun 2013-2014 kembali diperlihatkan dengan perlambatan laju ekonomi pada tahun 2015 dan hingga akhir tahun 2015 belum banyak perbaikan. Hal tersebut juga ditunjukkan lewat pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak baik dan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berpengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Tabel 4.6: Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Gresik Tahun 2013-2015 (Persen)

Sektor	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.42	5.18	6.07
Pertambangan dan Penggalian	-6.60	9.41	5.94
Industri Pengolahan	7.58	6.98	5.62
Pengadaan Listrik dan Gas	7.03	7.44	-0.55

Sektor	Tahun		
	2013	2014	2015
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah	7.72	1.42	4.96
Konstruksi	8.24	8.10	9.87
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	9.47	6.66	9.19
Transportasi dan Pergudangan	6.64	5.90	6.33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.45	9.10	8.75
Informasi dan Komunikasi	12.20	6.58	6.83
Jasa Keuangan dan Asuransi	12.29	5.15	7.34
Real Estate	6.62	6.41	6.02
Jasa Perusahaan	6.14	8.55	7.39
Adm. Pemerintah. Pertahanan&Jaminan Sosial Wajib	1.84	0.20	6.43
Jasa Pendidikan	6.78	6.97	7.88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.58	5.64	7.94
Jasa lainnya	5.54	5.09	5.85

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Tabel 4.7: Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik Tahun 2015

Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja
Pertanian. Kehutanan dan Perikanan	84.948
Pertambangan dan Penggalian	3.191
Industri Pengolahan	184.192
Pengadaan Listrik. Gas dan Air Minum	1.869
Konstruksi	59.690
Perdagangan. Rumah Makan. dan Jasa Akomodasi	133.640
Transportasi. Pergudangan. dan Komunikasi	17.891
Lembaga Keuangan. Real Estate. Usaha Persewaan. dan Jasa Perusahaan	7.811
Jasa Kemasyarakatan. Sosial. dan Perorangan	83.817
Jumlah	577.049

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Pada tabel 4.9 terlihat bahwa pertumbuhan sektoral di Kabupaten Gresik pada tahun 2013-2015 mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi terdapat pada jasa keuangan dan asuransi sebesar 12.29 persen, lalu tahun 2014 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi

pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9.41 persen, dan untuk tahun 2015 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi di Kabupaten Gresik adalah pada sektor konstruksi dengan nilai 9.87 persen. Kegiatan konstruksi terdiri dari pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian, prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Hasil kegiatan konstruksi antara lain: konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung bukan tempat tinggal, konstruksi bangunan sipil (misal jalan tol, jembatan, landasan pesawat terbang, dll), konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi, dan lain sebagainya (Badan Pusat Statistik, 2016). Kemudian penyerapan tenaga kerja pada Kabupaten Gresik yang ditunjukkan pada tabel 4.10 pada tahun 2015, penyerapan tenaga kerja tertinggi terdapat pada sektor industri pengolahan dengan jumlah pekerja sebesar 184.192. Sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi berada pada posisi kelima dengan jumlah pekerja 59.690.

Tabel 4.8: Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Bangkalan Tahun 2011-2015 (Persen)

Sektor	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.91	2.78	4.09
Pertambangan dan Penggalian	-8.54	10.62	-14.49
Industri Pengolahan	5.48	4.78	4.86
Pengadaan Listrik dan Gas	4.33	5.57	4.92
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5.13	3.24	4.54
Konstruksi	8.50	8.63	7.23
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	8.98	7.12	4.65
Transportasi dan Pergudangan	3.91	5.17	4.20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.23	8.16	8.16
Informasi dan Komunikasi	12.62	7.01	7.18
Jasa Keuangan dan Asuransi	10.15	4.48	3.31
Real Estate	6.10	4.87	5.70
Jasa Perusahaan	4.32	4.39	5.71
Adm. Pemerintah, Pertahanan&Jaminan Sosial Wajib	2.16	0.99	4.74

Sektor	Tahun		
	2013	2014	2015
Jasa lainnya	2.88	2.43	4.09
Jasa Pendidikan	3.70	4.46	5.93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.27	5.13	7.13

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Tabel 4.9: **Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bangkalan Tahun 2015**

Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	299.409
Pertambangan dan Penggalian	-
Industri Pengolahan	15.850
Pengadaan Listrik, Gas dan Air Minum	-
Konstruksi	30.255
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	53.829
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	16.708
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	2.822
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	38.409
Jumlah	457.282

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Pada tabel 4.11 terlihat bahwa pertumbuhan sektoral di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2013-2015 mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi terdapat pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 12.62 persen, lalu tahun 2014 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 10.62 persen, dan untuk tahun 2015 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi di Kabupaten Bangkalan terlihat bahwa pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi adalah pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai 8.16 persen. Dimana sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah kegiatan yang mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan

minuman untuk konsumsi segera (Badan Pusat Statistik, 2016). Kemudian penyerapan tenaga kerja pada Kabupaten Bangkalan yang ditunjukkan pada tabel 4.12 pada tahun 2015 terjadi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan jumlah pekerja 299. 409, sedangkan untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terdapat pada posisi kedua dengan jumlah pekerja 53.829.

Tabel 4.10: Perkembangan PDRB Sektoral Kota Mojokerto Tahun 2011-2015 (Persen)

Sektor	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4.83	4.64	3.00
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	4.75	6.01	6.09
Pengadaan Listrik dan Gas	0.93	4.94	2.19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	-2.32	-0.20	2.47
Konstruksi	6.12	6.02	3.55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	6.55	5.72	5.81
Transportasi dan Pergudangan	3.19	3.89	5.30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.41	6.26	6.28
Informasi dan Komunikasi	7.89	7.87	7.53
Jasa Keuangan dan Asuransi	9.02	6.27	5.97
Real Estate	6.69	4.72	4.29
Jasa Perusahaan	5.46	7.09	5.56
Adm. Pemerintah, Pertahanan&Jaminan Sosial Wajib	2.38	0.90	5.76
Jasa Pendidikan	7.99	5.09	6.42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.19	8.32	3.09
Jasa lainnya	6.31	5.53	4.99

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Tabel 4.11: Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Mojokerto Tahun 2015

Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.250
Pertambangan dan Penggalian	334
Industri Pengolahan	18.337
Pengadaan Listrik, Gas dan Air Minum	118

Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja
Konstruksi	3.444
Perdagangan. Rumah Makan. dan Jasa Akomodasi	23.527
Transportasi. Pergudangan. dan Komunikasi	2.409
Lembaga Keuangan. Real Estate. Usaha Persewaan. dan Jasa Perusahaan	2.653
Jasa Kemasyarakatan. Sosial. dan Perorangan	11.734
Jumlah	63.806

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Pada tabel 4.13 terlihat bahwa pertumbuhan sektoral di Kota Mojokerto pada tahun 2013-2015 mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi terdapat pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 9.02 persen, lalu tahun 2014 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8.32 persen, dan untuk tahun 2015 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi di Kota Mojokerto terlihat bahwa pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi adalah pada sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai 7.53 persen. Dimana sektor ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Sektor ini terdiri dari beberapa industri yaitu produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemrograman, konsultasi komputer, dan teknologi informasi (Badan Pusat Statistik, 2016). Kemudian penyerapan tenaga kerja pada Kota Mojokerto yang ditunjukkan pada tabel 4.14 pada tahun 2015 terjadi pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi dengan jumlah pekerja 23.527, sedangkan untuk sektor informasi dan komunikasi terdapat pada posisi keenam dengan jumlah pekerja 2.409. Tenaga kerja pada sektor informasi dan komunikasi tidaklah

mendominasi, karena masyarakat Kota Mojokerto banyak terserap pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi. Selain itu, tenaga kerja di Kota Mojokerto juga banyak terserap di sektor industri pengolahan dengan jumlah tenaga kerja 18.337 dan pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 11.734.

Tabel 4.12: Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 (Persen)

Sektor	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	3.02	2.86	2.14
Pertambangan dan Penggalian	1.02	2.11	1.97
Industri Pengolahan	6.38	7.05	6.58
Pengadaan Listrik dan Gas	4.59	7.11	2.79
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah	3.24	1.90	2.60
Konstruksi	9.30	7.33	3.28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	5.75	4.55	5.32
Transportasi dan Pergudangan	10.58	10.86	5.87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.31	9.90	8.63
Informasi dan Komunikasi	11.12	8.95	6.60
Jasa Keuangan dan Asuransi	12.24	8.02	6.90
Real Estate	8.72	7.37	5.37
Jasa Perusahaan	8.45	8.65	5.67
Adm. Pemerintah. Pertahanan&Jaminan Sosial Wajib	1.28	-0.04	4.27
Jasa Pendidikan	7.25	6.98	6.73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.82	14.93	3.36
Jasa lainnya	4.15	4.37	3.69

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Tabel 4.13: Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja
Pertanian. Kehutanan dan Perikanan	114.224
Pertambangan dan Penggalian	4.247
Industri Pengolahan	138.153
Pengadaan Listrik. Gas dan Air Minum	388
Konstruksi	45.685
Perdagangan. Rumah Makan. dan Jasa Akomodasi	104.585

Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	22.180
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	18.366
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	104.174
Jumlah	552.002

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Pada tabel 4.15 terlihat bahwa pertumbuhan sektoral di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2013-2015 mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi terdapat pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 12.24 persen, lalu tahun 2014 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 14.93 persen, dan untuk tahun 2015 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi di Kabupaten Mojokerto terlihat bahwa pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi adalah pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai 8.63 persen. Kemudian tenaga kerja yang terserap pada Kabupaten Mojokerto yang ditunjukkan pada tabel 4.16 pada tahun 2015 terjadi pada sektor industri pengolahan dengan jumlah pekerja 138.135, sedangkan untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terdapat pada posisi ketiga dengan jumlah pekerja 104.585. Banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan dikarenakan Kabupaten Mojokerto adalah salah satu kawasan industri. Kawasan industri itu adalah Ngoro Industrial Park (NIP) yang terdapat banyaknya perusahaan atau pabrik di dalamnya.

Tabel 4.14: Perkembangan PDRB Sektoral Kota Surabaya Tahun 2011-2015 (Persen)

Sektor	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.98	3.54	4.73
Pertambangan dan Penggalian	3.76	3.20	3.98

Sektor	Tahun		
	2013	2014	2015
Industri Pengolahan	6.51	10.13	5.88
Pengadaan Listrik dan Gas	-1.99	-1.90	-3.12
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah	2.12	0.76	5.17
Konstruksi	8.00	6.81	2.85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	6.80	4.88	6.20
Transportasi dan Pergudangan	8.05	8.46	6.42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.13	8.06	8.04
Informasi dan Komunikasi	12.74	6.53	6.38
Jasa Keuangan dan Asuransi	16.95	7.79	7.49
Real Estate	5.92	6.68	5.07
Jasa Perusahaan	4.84	6.45	5.38
Adm. Pemerintah. Pertahanan&Jaminan Sosial Wajib	1.25	0.33	4.45
Jasa Pendidikan	7.68	5.71	6.31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.97	9.39	4.04
Jasa lainnya	4.67	4.55	4.67

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Tabel 4.15: **Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Surabaya Tahun 2015**

Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja
Pertanian. Kehutanan dan Perikanan	9.743
Pertambangan dan Penggalian	1.887
Industri Pengolahan	255.102
Pengadaan Listrik. Gas dan Air Minum	2.589
Konstruksi	94.243
Perdagangan. Rumah Makan. dan Jasa Akomodasi	426.289
Transportasi. Pergudangan. dan Komunikasi	94.782
Lembaga Keuangan. Real Estate. Usaha Persewaan. dan Jasa Perusahaan	96.300
Jasa Kemasyarakatan. Sosial. dan Perorangan	384.245
Jumlah	1.365.180

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Pada tabel 4.17 terlihat bahwa pertumbuhan sektoral di Kota Surabaya pada tahun 2013-2015 mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi terdapat pada sektor jasa keuangan dan

asuransi sebesar 16.95 persen, lalu tahun 2014 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi pada sektor industri pengolahan sebesar 10.13 persen, dan untuk tahun 2015 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi di Kota Surabaya terlihat bahwa pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi adalah pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai 8.04 persen. Kemudian penyerapan tenaga kerja pada Kota Surabaya juga memperlihatkan hubungan sinkronasi dengan pertumbuhan PDRB sektoral, dimana penyerapan tertinggi pada tahun 2015 terdapat pada sektor perdagangan, rumah makan. dan jasa akomodasi sebanyak 426.289 yang ditunjukkan pada tabel 4.18. Lalu untuk tenaga kerja di Kota Surabaya juga banyak terserap di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan sebesar 384.245 dan sektor industri pengolahan dengan jumlah tenaga kerja 255.102.

Tabel 4.16: Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2015 (Persen)

Sektor	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	5.50	4.63	4.69
Pertambangan dan Penggalian	-13.98	15.05	-8.24
Industri Pengolahan	6.27	7.28	5.69
Pengadaan Listrik dan Gas	9.51	7.32	-3.25
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah	4.26	1.91	4.19
Konstruksi	6.76	6.67	3.66
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	9.30	6.53	4.64
Transportasi dan Pergudangan	5.71	0.57	5.27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.23	9.02	8.08
Informasi dan Komunikasi	9.65	8.74	6.88
Jasa Keuangan dan Asuransi	12.44	6.63	6.99
Real Estate	6.16	6.78	5.74
Jasa Perusahaan	4.98	6.68	5.05
Adm. Pemerintah. Pertahanan&Jaminan Sosial Wajib	1.81	1.28	2.11
Jasa Pendidikan	9.03	6.48	7.21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.60	9.17	5.09
Jasa lainnya	4.81	4.27	4.07

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Tabel 4.17: **Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015**

Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	64.648
Pertambangan dan Penggalian	1.429
Industri Pengolahan	366.800
Pengadaan Listrik, Gas dan Air Minum	2.302
Konstruksi	80.921
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	237.022
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	49.377
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	45.455
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	167.254
Jumlah	1.028.243

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Pada tabel 4.19 terlihat bahwa pertumbuhan sektoral di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013-2015 mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi terdapat pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 12.44 persen, lalu tahun 2014 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15.05 persen, dan untuk tahun 2015 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi di Kabupaten Sidoarjo terlihat bahwa pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi adalah pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai 8.08 persen. Kemudian tenaga kerja yang terserap pada Kabupaten Sidoarjo yang ditunjukkan pada tabel 4.20 pada tahun 2015 terjadi pada sektor industri pengolahan dengan jumlah pekerja 366.800, sedangkan untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terdapat pada posisi kedua dengan jumlah pekerja 237.022. Banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan dikarenakan Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kawasan industri. Kawasan industri tersebut adalah Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB) yang terdapat banyak perusahaan atau pabrik di dalamnya.

Tabel 4.18: **Perkembangan PDRB Sektoral Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 (Persen)**

Sektor	Tahun		
	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.94	4.98	4.60
Pertambangan dan Penggalian	1.65	6.08	9.64
Industri Pengolahan	6.94	11.60	7.71
Pengadaan Listrik dan Gas	3.78	6.29	1.57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	7.91	3.46	5.43
Konstruksi	5.89	5.05	1.66
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	9.85	7.84	7.22
Transportasi dan Pergudangan	8.09	8.87	7.61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.04	9.66	12.80
Informasi dan Komunikasi	7.81	6.80	7.02
Jasa Keuangan dan Asuransi	13.75	6.39	7.14
Real Estate	9.09	8.07	8.03
Jasa Perusahaan	5.85	6.36	6.84
Adm. Pemerintah, Pertahanan&Jaminan Sosial Wajib	1.69	0.38	6.05
Jasa Pendidikan	8.74	7.99	7.96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.10	9.69	9.14
Jasa lainnya	4.72	7.34	7.06

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Tabel 4.19: **Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamongan Tahun 2015**

Pekerjaan Utama	Jumlah Pekerja
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	287.362
Pertambangan dan Penggalian	1.474
Industri Pengolahan	66.201
Pengadaan Listrik, Gas dan Air Minum	-
Konstruksi	31.405
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	122.338
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	18.047
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	9.105
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	71.164
Jumlah	607.096

Sumber: BPS Jawa Timur. Data diolah (2016)

Pada tabel 4.21 terlihat bahwa pertumbuhan sektoral di Kabupaten Lamongan pada tahun 2013-2015 mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi terdapat pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 13.75 persen, lalu tahun 2014 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi pada sektor industri pengolahan sebesar 11.60 persen, dan untuk tahun 2015 pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi di Kabupaten Lamongan terlihat bahwa pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi adalah pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai 12.80 persen. Kemudian penyerapan tenaga kerja pada Kabupaten Lamongan memperlihatkan pertumbuhan PDRB sektoral tertinggi pada tahun 2015 terdapat pada sektor pertanian, kehutanan. dan perikanan sebanyak 287.362 yang ditunjukkan pada tabel 4.22. Lalu untuk tenaga kerja di Kabupaten Lamongan juga banyak terserap di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 122.338 dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan dengan jumlah tenaga kerja 71.164.

Jika dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi sektoral yang ada di kawasan Gerbangkertosusila, terlihat bahwa setiap wilayah memiliki pertumbuhan PDRB sektoral yang berubah-ubah setiap tahunnya dan berbeda-beda setiap daerah. Pada Kabupaten Gresik pertumbuhan sektor tertinggi adalah sektor konstruksi. Kemudian Kota Mojokerto pertumbuhan sektor tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi. Lalu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan pertumbuhan sektor tertinggi adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur perekonomian di kawasan Gerbangkertosusila didominasi oleh sektor yang

bersifat padat modal, sementara sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di Gerbangkertosusila, seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan kontribusinya sedikit. Kondisi seperti ini bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak berkualitas, dimana kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas karena ditopang oleh sektor-sektor yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak menyebar keseluruh sektor dan tidak merata karena nantinya semua itu hanya akan dinikmati oleh beberapa golongan masyarakat tertentu saja. Oleh sebab itu, adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kawasan Gerbangkertosusila tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Aprillia (2015) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan”, dimana variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang berlawanan dengan tingkat kemiskinan di Malang Raya. Namun pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan tersebut tidak berpengaruh signifikan. Lalu hasil dari penelitian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum menyebar di setiap golongan masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga belum efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori, penelitian, dan hipotesis yang peneliti pakai. Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Dimana kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

4.10.2 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh hasil bahwa koefisien dari variabel upah minimum Kabupaten/Kota bertanda negatif dengan nilai sebesar -0.166705 dan nilai signifikansi sebesar 0.0024 (lebih kecil dari α (alpha) 5% atau 0,05). Artinya bahwa variabel upah minimum Kabupaten/Kota memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maka tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya.

Hasil analisis diatas sesuai dengan tujuan dari penetapan upah minimum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999, adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menurunkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum. Kemudian menurut Kaufman dalam Prastyo (2010) tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.

Upah minimum yang setiap tahunnya meningkat dapat menjadi standar pengupahan yang layak serta lebih baik. Penetapan upah minimum ini sebisa mungkin paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi para pekerja atau karyawan. Penetapan upah minimum ini juga sebagai acuan bagi

para pekerja paling sedikit memiliki upah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja para pekerja.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Istifaiyah (2015), dimana upah minimum yang tiap tahunnya meningkat dapat memberikan standar pengupahan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada para karyawannya sehingga para karyawan atau para pekerja mempunyai gaji/upah minimum yang setiap tahunnya telah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu hal tersebut dapat merupakan perlindungan bagi para pekerja agar tidak terjerat dalam kemiskinan. Hasil penelitian yang dilakukan Istifaiyah juga menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.10.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh hasil bahwa koefisien dari variabel rata-rata lama sekolah bertanda negatif dengan nilai sebesar -1.852709 dan nilai signifikansi sebesar 0.0000 (lebih kecil dari α (alpha) 5% atau 0,05). Artinya bahwa variabel rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kenaikan rata-rata lama sekolah, maka tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) dalam Nugroho dan Purwanti (2011) untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di

suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kenyataan yang dapat dilihat dan diambil pembelajarannya adalah dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerja para pekerja. Perusahaan pun juga akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi para pekerja yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Siregar dan Wahyuniarti (2008), dimana menggunakan jumlah penduduk lulusan SMP, jumlah lulusan SMA dan jumlah lulusan diploma sebagai ukuran pendidikan. Kemudian hal ini juga sesuai dengan penelitian Wongdesmiwati (2009), yang menggunakan angka melek huruf sebagai ukuran pendidikan serta sesuai dengan penelitian Nugroho dan Purwanti (2011) yang menggunakan salah satu indikator pendidikan yaitu berupa rata rata lama sekolah, dimana rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Karena hasil dari penelitian diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dan indikator pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah sebagai indikator penting pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dimana semakin tinggi rata rata lama sekolah formal yang dijalani maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin.

4.10.4 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh hasil bahwa koefisien dari variabel tingkat pengangguran terbuka bertanda positif dengan nilai sebesar 0.164868 dan nilai signifikansi sebesar 0.0033 (lebih kecil dari α (alpha) 5% atau 0,05). Artinya bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka, maka tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Menurut Sukirno (2008) dalam Dani (2015), terdapat hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat akan mencapai titik maksimum apabila tingkat pengangguran tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Terjadinya pengangguran akan mengurangi tingkat kemakmuran masyarakat dan akan berakhir pada kemiskinan.

Pengangguran yang semakin tinggi akan menimbulkan efek buruk yaitu dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Cholili (2014) dan Anjuli dan Fitrayati (2013) dimana diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dimana ketika tingkat pengangguran terbuka meningkat maka tingkat kemiskinan juga meningkat. Kemudian hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Istifaiyah (2015), yang menyatakan bahwa setiap bertambahnya jumlah pengangguran sebesar 1 persen, maka dapat menyebabkan pendapatan rendah bahkan tidak memiliki pendapatan, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami penurunan. Hasil penelitian yang dilakukan Istifaiyah menunjukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.11 Implikasi Hasil Penelitian

Fenomena kemiskinan merupakan masalah yang pelik yang tidak pernah ada hentinya yang telah dirasakan masyarakat sejak lama. Banyaknya jumlah penduduk dan tidak meratanya pembangunan, kurangnya pemerataan lapangan pekerjaan yang dapat mengakibatkan banyaknya pengangguran yang terjadi di perkotaan maupun di pedesaan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena disebabkan rendahnya pendidikan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah kemiskinan di banyak negara termasuk negara-negara berkembang, dan sampai saat ini masalah kemiskinan di Indonesia dan di wilayah-wilayah Indonesia seperti di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusilo belum sepenuhnya teratasi.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional yang harus ditangani. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya pengentasan kemiskinan yang berbagai aspek yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar pembangunan ekonomi berjalan dengan baik

sehingga kualitas hidup masyarakat juga berjalan dengan baik. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas upah, yang nantinya akan menyerap tenaga kerja dan seharusnya dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kemiskinan yang terjadi bisa berkurang.

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera. Menurut Sirojuzilam (2008), pertumbuhan ekonomi merupakan implikasi dari kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan dari berbagai macam sektor ekonomi dan merupakan indikator penting bagi suatu negara atau daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan.

Dari hasil analisis di atas, diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Hal tersebut memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain tinggi rendahnya atau naik turunnya pertumbuhan ekonomi tidak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan dan tidak akan membuat tingkat kemiskinan ikut naik atau turun pula.

Tidak berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi di SWP Gerbangkertosusila terhadap tingkat kemiskinan disebabkan oleh struktur perekonomian di kawasan Gerbangkertosusila didominasi oleh sektor yang bersifat padat modal, sementara sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di Gerbangkertosusila, seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan

kontribusinya sedikit. Kondisi seperti ini bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak berkualitas, dimana kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas karena ditopang oleh sektor-sektor yang hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak menyebar keseluruh sektor dan tidak merata karena nantinya semua itu hanya akan dinikmati oleh beberapa golongan masyarakat tertentu saja. Maka dari itu, adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kawasan Gerbangkertosusila tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.

Melihat hasil penelitian tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah segera berbenah dalam menanggapi masalah ini. Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sehingga untuk kedepannya pembangunan ekonomi harus dilakukan tidak hanya meningkatkan angka dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri untuk masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat terutama masyarakat miskin dengan melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi sehingga kesejahteraannya semakin membaik, keterlibatan masyarakat sendiri bisa sebagai tenaga kerja atau pelaku ekonomi dari kegiatan penunjangnya sehingga akan terjadi peningkatan pendapatan pada masyarakat.

Kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi dalam penurunan penduduk miskin juga bisa diindikasikan oleh laju pengangguran yang masih relatif tinggi. Selama tahun 2006-2015, rata-rata laju pengangguran juga diketahui berpengaruh positif sebesar 6.67% per tahun. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada jangka waktu tersebut bersumber dari

sektor-sektor yang cenderung padat modal dimana sektor tersebut kurang menyerap tenaga kerja. Sedangkan sektor padat karya seperti sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, yang banyak menyerap tenaga kerja hanya mendapat sedikit kontribusi dalam pertumbuhannya. Dimana di kawasan pedesaan sendiri, rata-rata masyarakat penduduk miskin bermata pencaharian sebagai petani, dan hasil dari sektor pertanian itu masih kurang bagus yang berdampak pada lambannya peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang bekerja sebagai petani.

Untuk kedepannya diharapkan adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan teknologi yang ada, baik untuk pertanian (usaha tani) ataupun perikanan (budidaya ikan dan tangkap). Ketertinggalan penggunaan teknologi ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing produk-produk pertanian dan industri agro. Maka dari itu diperlukan pembaharuan dalam teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta nantinya dapat membantu produk-produk pertanian dan industri agro dapat bersaing di pasaran dan tidak kalah dengan produk negara lain yang sejenis.

Tidak hanya pada ketertinggalan teknologi saja, kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi juga bisa diindikasikan karena masih lemahnya keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya, termasuk pariwisata dan industri pengolahan. Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008) adanya keterkaitan sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya maka akan dapat memperkuat perekonomian. Penguatan keterkaitan antara sektor pertanian dan industri agro dengan sektor-sektor lainnya berarti peningkatan mobilitas (aliran) bahan baku (output) di antara sektor-sektor tersebut. Sektor pertanian dan industri agro, atau yang lebih umum yaitu industri pedesaan yang

berskala kecil dan menengah, perlu ditingkatkan keterkaitannya dengan usaha-usaha berskala besar dalam bentuk kemitraan yang nantinya akan saling menguntungkan sama lain. Dengan demikian perkembangan yang terjadi pada usaha-usaha berskala besar (yang umumnya adalah sektor modern berteknologi yang maju) akan dapat mengangkat kinerja petani dan pengolahan hasil pertanian berskala kecil dan menengah atau UKM.

Disini peran masyarakat dibutuhkan untuk dilibatkan dalam kegiatan ekonomi dan berperan sebagai tenaga kerja atau pelaku ekonomi sehingga akan terjadi peningkatan pendapatan pada masyarakat lewat kerjasama atau kemitraan dengan industri besar. Jika ditelaah hubungan ini juga saling menguntungkan satu sama lainnya, dimana industri besar dapat memenuhi kebutuhan bahan baku lewat hasil dari hasil produktivitas masyarakat dan masyarakat juga dapat mendapatkan pendapatan dari hasil kerjasama itu. Tidak hanya itu saja dampak positif lainnya adalah dengan industri besar memakasi bahan baku dari masyarakat sekitar sendiri, maka industri besar itu memanfaatkan potensi dari daerah sekitar yang dengan kata lain tidak diperlukan membeli bahan baku dari daerah luar ataupun mengimpor bahan baku jika bahan baku dari masyarakat sudah sangat mencukupi dan dengan kualitas yang hampir sama. Jika hal ini terjadi di setiap daerah maka kemungkinannya adalah akan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah.

Untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka diperlukan peran pemerintah dalam memajukannya. Seperti dalam hal menciptakan iklim investasi dimana investasi sendiri sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan dan bentuk investasi yang perlu dilakukan adalah dengan mempercepat industrialisasi pertanian. Selanjutnya peran pemerintah dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur teknis atau fisik yang ada, terutama di daerah pedesaan. Adanya infrastruktur yang memadai maka

nantinya dapat mendukung kelancaran aktivitas perekonomian, contohnya dengan adanya jalan raya maka akan memudahkan dalam pendistribusian aliran produksi barang dan jasa. Hal ini selain membutuhkan campur tangan pemerintah juga dibutuhkan peran swasta. Sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama kedua belah pihak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Selanjutnya faktor lain yang menyebabkan kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi karena terkonsentrasinya kegiatan pembangunan di daerah-daerah tertentu saja. Maka disini diharapkan pemerintah melakukan pemerataan pembangunan ekonomi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan merata di setiap daerah dan tidak terpusat di beberapa daerah atau daerah tertentu saja. Jika terkonsentrasi pada daerah tertentu saja maka yang terjadi adalah pelonjakan sumber daya manusia pada daerah tersebut yang nantinya akan berujung kembali pada pengangguran. Dengan sebaran sumber daya manusia yang semakin tinggi juga diiringi kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Kualitas dari sumber daya manusia umumnya memiliki tingkat pendidikan yang tidak tinggi dan mempunyai persepsi merubah nasib namun kenyataan tidaklah semudah itu jika kualitas dari sumber daya itu juga tidak memadai. Jadi, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan dari sumber daya manusianya serta mendorong dipercepatnya industrialisasi pertanian/pedesaan sebagai salah satu upaya untuk menekan pelonjakan sumber daya manusia di daerah-daerah besar dengan masyarakat melakukan usaha tani untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Selanjutnya di suatu wilayah yang berkarakteristik banyak industri yang menyerap banyak tenaga kerja, upah minimum juga merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kesejahteraan atau kemiskinan penduduk.

Menurut Sumarsono (2003) upah merupakan sumber utama penghasilan seorang pekerja, sehingga upah harus cukup memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Batas kewajaran tersebut dalam Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum (KHM) atau seringkali saat ini disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dari hasil analisis data di atas diperoleh hasil bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap terjadi kenaikan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maka tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila akan mengalami penurunan. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sendiri pada umumnya setiap tahun akan mengalami peningkatan karena penentuannya yang berdasar pada kebutuhan hidup dari para pekerja. Sudah menjadi hal yang umum bahwa kebutuhan hidup masyarakat seiring berjalannya waktu terus meningkat, maka sepantasnya jika Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) juga akan mengalami kenaikan sesuai dengan biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi.

Oleh sebab itu, penetapan upah minimum harus tetap diberlakukan secara konsisten, karena upah adalah sebagai salah satu elemen penting bagi para pekerja/karyawan dan diharapkan di tahun-tahun selanjutnya upah minimum Kabupaten/Kota juga dapat naik menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi perekonomian saat itu di setiap daerah dengan adil, sehingga para pekerja/karyawan dapat memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) sehari-hari dengan seperti ini maka pekerja dapat terlindungi dengan haknya dan terhindar dari garis kemiskinan karena kehidupan pekerja/karyawan yang sejahtera.

Peningkatan upah juga dianggap mampu meningkatkan produktivitas dari para pekerja. Dimana hal tersebut akan mampu membuat tingkat produksi dari setiap usaha semakin meningkat dan berkembang. Dengan demikian, tingginya produktivitas yang dihasilkan para pekerja memberikan dampak yang baik bagi perusahaan. Sehingga kedua belah pihak antara pekerja dan perusahaan sama-sama diuntungkan dengan kondisi ini.

Selain itu untuk menjaga hubungan antara pekerja dan perusahaan diharapkan pemerintah disini juga melakukan hubungan industrial yang terjalin baik antara perusahaan (pengusaha), pekerja/karyawan, dan pemerintah itu sendiri. Adanya hubungan industrial ini diharapkan dapat mengkomunikasikan semua hal yang bersangkutan antara keinginan perusahaan (pengusaha) dan pekerja/karyawan, lalu tugas pemerintah sebagai mediator kedua belah pihak akan mencari solusi terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Sehingga nantinya tidak akan terjadi perselisihan hubungan industrial. Selain itu pemerintah juga harus selalu mengawasi setiap jalannya kebijakan dengan baik, lalu dapat tegas dalam mengambil keputusan dalam memberikan peringatan atau sanksi.

Kemudian, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang penting juga dalam suatu pembangunan. Menurut Todaro (2011) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dari hasil analisis data di atas diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di SWP

Gerbangkertosusila. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap terjadi peningkatan tingkat pendidikan maka tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila akan mengalami penurunan. Pendidikan dapat mempengaruhi kualitas modal manusia. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup seseorang. Pendidikan (formal dan non-formal) memiliki peran penting untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara tidak langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Dengan melakukan investasi pendidikan secara bertahap, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dapat diperlihatkan dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tiap individu. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga dapat mendorong adanya peningkatan produktivitas kerja seseorang. Tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi saat ini sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja apalagi di perusahaan yang berskala besar. Perusahaan akan lebih banyak memperkerjakan tenaga kerja yang memiliki produktivitas yang tinggi sehingga perusahaan akan memperoleh hasil lebih, dengan produktivitas yang tinggi yang dimiliki seseorang atau pekerja, maka perusahaan juga akan bersedia memberikan upah atau gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan.

Tingkat pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah menunjukkan perkembangan yang baik. Untuk rata-rata lama sekolah di Kabupaten/Kota untuk penduduk usia 15 tahun ke atas di kawasan Gerbangkertosusila menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran

masyarakat tentang pentingnya pendidikan mulai tinggi. Tetapi juga bisa dilihat bahwa rata-rata lama sekolah yang cukup tinggi terjadi pada daerah-daerah perkotaan dan relatif maju seperti Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo yang mana penduduk usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan formal 10 tahun yang setara dengan kelas 1 tingkat Sekolah Menengah Atas. Sedangkan untuk daerah-daerah seperti pedesaan yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bangkalan memiliki nilai rata-rata lama sekolah dibawah 8 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran masyarakat perkotaan tentang pendidikan lebih panjang dan menjadikan pendidikan sebagai bagian kebutuhan hidup yang penting bagi mereka. Berbeda dengan pemikiran masyarakat pedesaan yang memandang pendidikan tidak begitu penting, yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana cara mencukupi kebutuhan hidup. Jadi, masyarakat pedesaan lebih memilih anak-anaknya untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Selain itu sarana dan prasarana di daerah perkotaan jauh lebih memadai dibandingkan di daerah pedesaan.

Disinilah peran pemerintah untuk meningkatkan investasi dan kualitas dalam bidang pendidikan. Salah satu cara investasi dan meningkatkan kualitas di bidang pendidikan adalah dengan mendukung penuh program wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun sudah dan diharapkan di tingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun agar semua orang dapat mengenyam pendidikan yang tinggi setara SMA/SMK/Sederajat. Selain itu, pemerintah juga harus lebih berupaya lagi dalam memberikan jaminan pendidikan terutama bagi orang miskin agar masyarakat miskin mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pendidikan, serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolah maupun universitas, juga menambah jumlah tenaga

pengajar hingga ke pelosok-pelosok negeri secara merata agar tidak hanya terpusat di suatu daerah tertentu saja tetapi juga ke seluruh daerah khususnya yang banyak tertinggal. Peran pemerintah dalam pengambil kebijakan juga tidak boleh lengah dalam pengawasan kebijakannya, agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan serta target sarannya.

Dan yang terakhir adalah masalah pengangguran, dimana pengangguran sendiri merupakan permasalahan yang sejalan dengan timbulnya kemiskinan. Meskipun penyebab kemiskinan ditimbulkan oleh banyak faktor, namun pengangguran merupakan masalah utama yang umumnya lebih banyak dicirikan oleh daerah perkotaan sebagai efek dari industrialisasi. Hilangnya pekerjaan yang dimiliki seseorang menyebabkan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga kesejahteraan menurun.

Dari hasil analisis data di atas diperoleh hasil bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap terjadi peningkatan tingkat pengangguran maka tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila akan mengalami peningkatan pula. Seperti yang diketahui bahwa efek buruk dari pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang nantinya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai seseorang. Dengan turunnya kesejahteraan masyarakat akibat menganggur akan meningkatkan peluang terjatuh dalam lingkaran kemiskinan. Sehingga masalah kemiskinan akan terus menerus menjerat masyarakat, jika tidak ada upaya untuk mengatasinya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang sering digunakan pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerjanya di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka merupakan suatu nilai yang

menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan namun belum memulai bekerja. Selama kurun waktu 2006-2015 tercatat Kabupaten/Kota di kawasan Gerbangkertasusila Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bergerak fluktuatif. Besaran nilai TPT Kabupaten/Kota di kawasan Gerbangkertasusila terjadi pada daerah perkotaan dan relatif maju seperti Kota Surabaya dan Kota Mojokerto. Daerah seperti Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik juga termasuk memiliki angka TPT yang cukup tinggi, karena daerah ini termasuk daerah yang relatif maju dan memiliki kedekatan dengan Kota Surabaya sebagai kota metropolitan.

Pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat dan semakin besar jumlahnya di Kabupaten/Kota per tahunnya akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah angkatan kerja. Padahal tidak semua angkatan kerja dapat terserap sepenuhnya di pasar tenaga kerja. Angkatan kerja yang tidak terserap di lapangan kerja akan menjadi pengangguran. Tidak hanya itu, masalah yang timbul lainnya proses urbanisasi dari daerah-daerah pedesaan ke kota-kota menjadi bertambah deras. Karena masyarakat berpikir bahwa mencari pekerjaan di perkotaan lebih banyak dan menjamin untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Tanpa mengetahui kondisi dan fakta-fakta sebenarnya yang terjadi mencari pekerjaan di perkotaan.

Permasalahan lain yang timbul dari angkatan kerja adalah keterbatasan mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja karena kurangnya keterampilan atau *skill* yang dimiliki sehingga mereka mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Hal ini membuat mereka memilih untuk bekerja di sektor informal yang memberikan penghasilan yang lebih kecil dibandingkan sektor formal. Selain itu, masalah lain yang dihadapi angkatan kerja adalah

keterbatasan peluang pengembangan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, adanya ketimpangan upah atau pendapatan, serta kurang terjaminnya perlindungan bagi pekerja khususnya bagi pekerja wanita dan pekerja anak (pekerja di bawah umur).

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran adalah dengan memperluas kesempatan kerja antara lain dengan cara peningkatan jaringan informasi pasar kerja, serta mendorong sektor lain yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah juga harus berperan dalam membuat kebijakan salah satunya dengan mempermudah perijinan usaha bagi masyarakat yang ingin berwirausaha, lalu meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas pelatihan kerja (BLK) salah satunya memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat bersaing di dunia kerja, meningkatkan kewirausahaan yang dibekali dengan pelatihan khusus dan juga dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat sehingga keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pekerja dapat meningkat. Selain itu menekan jumlah pertumbuhan penduduk juga penting, dengan lebih cara lebih intens dalam penyuluhan pentingnya program KB (Keluarga Berencana) kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila pada tahun 2006-2015, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila adalah variabel upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran. Sedangkan, variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan adalah variabel pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa terdapat hubungan berlawanan atau mempunyai pengaruh negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Namun, pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan tersebut tidak signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa dengan terjadinya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian tidak berperan memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di SWP Gerbangkertosusila masih belum berkualitas dan belum menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin.

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan atau mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Hal ini menjelaskan bahwa dengan terjadinya peningkatan pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Standar penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota telah diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Peningkatan Upah Minimum setiap tahunnya, diharapkan dapat memberikan penghasilan yang layak bagi para pekerja dan dapat memenuhi standar kebutuhan hidup layak para pekerja setiap harinya. Sehingga apabila upah minimum para pekerja semakin meningkat maka dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap para pekerja dan juga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Maka para pekerja tidak terjerat dalam kemiskinan.
4. Tingkat Pendidikan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan atau mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Hal ini menjelaskan bahwa dengan terjadinya peningkatan pada tingkat pendidikan akan menurunkan tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Sebagai salah satu modal manusia (*human capital*), pendidikan adalah faktor yang sangat penting untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang tinggi, dimana seseorang akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Maka dengan melakukan investasi pendidikan secara bertahap, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang, maka dapat mendorong produktivitas kerja seseorang dikarenakan memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang tinggi.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah atau mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Hal ini menjelaskan bahwa dengan terjadinya peningkatan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) akan meningkatkan tingkat kemiskinan di SWP Gerbangkertosusila. Pengangguran dapat terjadi salah satunya dikarenakan terlalu banyaknya kuota calon pekerja sedangkan kapasitas lowongan tempat kerja tidak memadai, lalu tidak sesuai kualifikasi pekerjaan dengan calon pekerja, dan kemudian terjadi adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan kepada para pekerjanya yang menyebabkan pekerja tersebut tidak memiliki pendapatan dan rentan hidup dibawah garis kemiskinan. Akibatnya mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memiliki kehidupan yang tidak sejahtera, dengan kata lain mereka akan terjebak pada lubang kemiskinan dan dapat memicu terjadinya kenaikan angka kemiskinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan peneliti, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi harus dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat terutama masyarakat miskin dengan melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi sehingga kesejahteraannya semakin membaik, keterlibatan masyarakat sendiri bisa sebagai tenaga kerja atau pelaku ekonomi dari kegiatan penunjangnya sehingga akan terjadi

peningkatan pendapatan pada masyarakat. Lalu melakukan pemerataan pembangunan ekonomi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan merata di setiap daerah dan tidak terpusat di beberapa daerah atau daerah tertentu saja. Peran pemerintah untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, lalu menciptakan iklim investasi dengan mempercepat industrialisasi pertanian, serta membangun dan memperbaiki infrastruktur teknis atau fisik yang ada, terutama di daerah pedesaan

2. Untuk penetapan upah minimum harus tetap diberlakukan secara konsisten dan diharapkan di tahun-tahun selanjutnya upah minimum Kabupaten/Kota juga dapat naik menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi perekonomian saat itu di setiap daerah dengan adil, sehingga para pekerja/karyawan dapat memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) sehari-hari. Selain itu diharapkan pemerintah melakukan hubungan industrial yang terjalin baik antara perusahaan (pengusaha), pekerja/karyawan, dan pemerintah untuk mengkomunikasikan semua hal yang bersangkutan antara keinginan perusahaan (pengusaha) dan pekerja/karyawan. Pemerintah juga harus selalu mengawasi setiap jalannya kebijakan dengan baik, lalu dapat tegas dalam mengambil keputusan dalam memberikan peringatan atau sanksi.
3. Pemerintah disini harus terus meningkatkan investasi dan kualitas dalam bidang pendidikan. Salah satu cara investasi dan meningkatkan kualitas di bidang pendidikan dengan mendukung penuh program wajib belajar 9 tahun dan meningkatkannya menjadi program wajib belajar 12 tahun agar semua orang dapat mengenyam pendidikan yang tinggi setara SMA/SMK/ sederajat. Selain itu, pemerintah juga harus lebih berupaya lagi dalam memberikan jaminan pendidikan terutama bagi orang miskin serta

meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolah maupun universitas, juga menambah jumlah tenaga pengajar hingga ke pelosok-pelosok negeri secara merata agar tidak hanya terpusat di suatu daerah tertentu saja tetapi juga ke seluruh daerah khususnya yang banyak tertinggal.

4. Upaya untuk mengatasi masalah pengangguran adalah dengan memperluas kesempatan kerja antara lain dengan cara peningkatan jaringan informasi pasar kerja, serta mendorong sektor lain yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah juga harus berperan dalam membuat kebijakan salah satunya dengan mempermudah perijinan usaha bagi masyarakat yang ingin berwirausaha, lalu meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas pelatihan kerja (BLK) salah satunya memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat bersaing di dunia kerja, meningkatkan kewirausahaan yang dibekali dengan pelatihan khusus dan juga dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat sehingga keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pekerja dapat meningkat. Selain itu menekan jumlah pertumbuhan penduduk juga penting, dengan lebih cara lebih intens dalam penyuluhan pentingnya program KB (Keluarga Berencana) kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjuli, Adecitya D dan Fitrayati, Dhiah. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang. Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol 1, No.3*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Attibrizi, Ali. 2016. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Dan Hubungannya Dengan Keberpihakan Terhadap Masyarakat Miskin Di Indonesia (Studi Kasus Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia Periode 2007-2013)*. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Aprilia, Rizki D. 2016. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Aprillia, Anggi. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Malang Raya Tahun 2004-2013)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan, Edisi 5, Cetakan I, UPP STIM*. Yogyakarta: YKPN.
- Assegaf, Nurhayati Ali. 2015. *Konsep Kesejahteraan dan Problematika Kemiskinan (Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program BLT)*. Malang: Intrans Publishing.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2017. *Data Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2002-2016*. jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2012. *Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2011*. jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2013. *Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2012*. jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2014. *Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2013*. jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. *Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014*. jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. *Laporan Eksekutif Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2015*. jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016.

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utamanya Tahun 2005-2015*. jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 21 September 2017.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2002-2015*. jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2010*. www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2009-2013*. www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2011-2015*. www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 21 September 2017.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2014. *Rata-rata Lama Sekolah Jawa Timur 1999, 2002, 2004- 2013*. jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 19 Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2005-2015*. jatim.bps.go.id. Diakses pada tanggal 06 Desember 2016.
- Cholili, F.M. 2014. *Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Dani, Fahmi Rahmad. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004-2013*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Fadilah, Fidha R. 2016. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur 2009-2013*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Fitriyah, Lailatul dan Rachmawati, Lucky. 2013. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmiah*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.

- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics Fourth Edition*. New York: The McGraw Hill Companies Inc.
- Halim, Muh. Abdul. 2012. *Teori Ekonomika*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Istifaiyah, Lailatul. 2015. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila tahun 2009-2013)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Jhingan, M.L. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Thesis? Edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Khabhibi, Achmad. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Laksono, H.R. Agung. 2013. *Menuju Indonesia Emas (Gerakan Bersama Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur dan Sejahtera)*. Jakarta Pusat: Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan.
- Maipata, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: YKPN.
- Nabila, Hana Ainin. 2015. *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Nugroho, Widiatma dan Purwanti, Evi Y. 2011. *Analisis Pengaruh Pdrb, Agrishare, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Angka Melek Huruf Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia*. Jurnal. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurtiyas, Febrika. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi Di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.2 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota Di Jawa Timur. [Jdih.jatimprov.go.id](http://jdih.jatimprov.go.id). Diakses pada tanggal 12 Januari 2017.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja: Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.

- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.
- Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.
- Permana, Anggit Yoga. 2012. *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Prastyo, Adit A. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pratomo, Devanto Shasta dan Saputra, Putu Mahardika A. 2011. *Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian yang Berkeadilan Tinjauan UUD 1945. Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Satria, Dias. 2015. *Analisis Regresi Model Data Panel*. <http://www.diassatria.com/analisis-regresi-model-data-panel/>. Diakses pada tanggal 05 Maret 2017.
- Saputra, Whisnu Adhi. 2011. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pdrb, Ipm, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Siregar, Hermanto dan Wahyuniarti, Dwi. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Jurnal Ilmiah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sirojuzilam. 2008. *Disparitas Ekonoomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Pustaka Bangsa Press
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Edisi ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Jember: Penerbit Graha Ilmu.
- Sunusi, dkk. 2014. *Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 No. 2*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Swantoro, Sandy S. 2011. *Keterkaitan Antara Aglomerasi Industri, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan (Kawasan Gerbangkertasusila Tahun 2000-2010)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Trisnanesya, Briliandara R. 2016. *Pengaruh Upah Minimum, Populasi Penduduk Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2009-2013*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerjemah: Aris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M.P dan Smith, S.C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi kesebelas, Jilid I, Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.
- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Pasal 13 tentang Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan.
- Wardana, Rangga S. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Widodo, dkk. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Teori dan Praktek)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wongdesmiwati. 2009. *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika*. https://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia_analisis-ekonometri_.pdf. Diakses pada tanggal 20 Februari 2017.
- Yudha, Okta R P. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2011*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- _____. 2011. *Gerbangkertosusila*. diakses melalui situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Gerbangkertosusila> pada tanggal 21 September 2017

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015.

Kabupaten/Kota	Tahun	Tingkat Kemiskinan (POV)	Pertumbuhan Ekonomi (GRO)	Upah Minimum (WAG)	Tingkat Pendidikan (EDU)	Tingkat Pengangguran (UNP)
Kab. Gresik	2006	25.19	6.81	665200	8.40	7.88
Kab. Gresik	2007	23.98	6.70	743500	8.40	8.14
Kab. Gresik	2008	21.43	6.34	803652	8.40	7.50
Kab. Gresik	2009	19.14	9.30	971624	8.49	7.01
Kab. Gresik	2010	16.42	6.89	1010400	8.53	7.70
Kab. Gresik	2011	15.30	7.04	1133000	8.70	4.36
Kab. Gresik	2012	14.30	7.26	1257000	8.98	6.72
Kab. Gresik	2013	13.89	6.89	1740000	8.91	4.55
Kab. Gresik	2014	13.41	6.44	2195000	8.87	5.06
Kab. Gresik	2015	13.63	5.24	2707500	9.31	5.67
Kab. Bangkalan	2006	33.53	4.80	550000	5.00	12.88
Kab. Bangkalan	2007	31.56	5.02	586000	5.00	7.90
Kab. Bangkalan	2008	32.70	4.92	622000	5.00	7.26
Kab. Bangkalan	2009	30.45	4.96	715000	5.13	5.01
Kab. Bangkalan	2010	28.12	5.44	775000	5.16	5.79
Kab. Bangkalan	2011	26.20	3.31	850000	5.21	3.91
Kab. Bangkalan	2012	24.62	1.42	885000	5.74	5.32
Kab. Bangkalan	2013	23.14	0.19	983800	5.66	6.78
Kab. Bangkalan	2014	22.38	7.19	1102000	5.94	5.68
Kab. Bangkalan	2015	22.57	2.66	1267300	5.79	5.00
Kota Mojokerto	2006	10.72	5.51	565000	9.48	10.24
Kota Mojokerto	2007	10.46	5.98	656600	9.66	11.94
Kota Mojokerto	2008	8.88	5.27	687500	9.66	12.12
Kota Mojokerto	2009	7.19	5.14	760000	9.67	9.30
Kota Mojokerto	2010	7.42	6.09	805000	9.97	7.52
Kota Mojokerto	2011	6.90	5.97	835000	10.05	5.86
Kota Mojokerto	2012	6.46	6.09	875000	10.11	7.32
Kota Mojokerto	2013	6.63	6.20	1040000	9.94	5.73
Kota Mojokerto	2014	6.42	5.83	1250000	10.06	4.42
Kota Mojokerto	2015	6.16	5.74	1437500	10.10	4.88
Kab. Mojokerto	2006	16.90	5.47	655200	7.17	7.99
Kab. Mojokerto	2007	14.86	5.93	740000	7.67	6.68

Kabupaten/Kota	Tahun	Tingkat Kemiskinan (POV)	Pertumbuhan Ekonomi (GRO)	Upah Minimum (WAG)	Tingkat Pendidikan (EDU)	Tingkat Pengangguran (UNP)
Kab. Mojokerto	2008	14.61	5.88	803652	7.67	7.04
Kab. Mojokerto	2009	13.24	5.21	971624	7.79	5.54
Kab. Mojokerto	2010	12.23	6.78	1009150	7.81	4.84
Kab. Mojokerto	2011	11.40	6.61	1105000	7.98	4.31
Kab. Mojokerto	2012	10.67	7.26	1234000	7.94	3.42
Kab. Mojokerto	2013	10.94	6.56	1700000	8.22	3.16
Kab. Mojokerto	2014	10.56	6.45	2050000	8.32	3.81
Kab. Mojokerto	2015	10.57	5.65	2695000	8.19	4.05
Kota Surabaya	2006	8.08	6.35	655500	9.72	9.68
Kota Surabaya	2007	7.98	6.31	746000	9.82	11.59
Kota Surabaya	2008	8.23	6.23	805500	9.84	11.84
Kota Surabaya	2009	6.72	5.53	948500	9.94	8.63
Kota Surabaya	2010	7.07	7.09	1031500	9.95	6.84
Kota Surabaya	2011	6.60	7.13	1115000	10.02	5.15
Kota Surabaya	2012	6.23	7.35	1257000	9.96	5.07
Kota Surabaya	2013	5.97	7.58	1740000	9.94	5.32
Kota Surabaya	2014	5.79	6.96	2200000	10.08	5.82
Kota Surabaya	2015	5.82	5.97	2710000	10.54	7.01
Kab. Sidoarjo	2006	12.97	5.38	655200	9.49	9.40
Kab. Sidoarjo	2007	13.05	4.99	743500	9.49	12.67
Kab. Sidoarjo	2008	8.35	4.83	802000	9.49	11.91
Kab. Sidoarjo	2009	6.91	4.91	955000	9.78	10.19
Kab. Sidoarjo	2010	7.45	5.63	1005000	9.84	8.35
Kab. Sidoarjo	2011	7.00	7.04	1107000	9.89	4.75
Kab. Sidoarjo	2012	6.42	7.26	1252000	9.92	5.21
Kab. Sidoarjo	2013	6.69	6.89	1720000	10.23	4.12
Kab. Sidoarjo	2014	6.40	6.44	2190000	10.11	3.88
Kab. Sidoarjo	2015	6.44	5.24	2705000	10.46	6.30
Kab. Lamongan	2006	25.74	5.39	558000	6.76	9.12
Kab. Lamongan	2007	25.79	5.76	600000	6.76	6.31
Kab. Lamongan	2008	22.51	6.22	650000	6.76	6.30
Kab. Lamongan	2009	20.47	6.31	760000	7.03	4.92
Kab. Lamongan	2010	18.70	6.89	875000	7.19	3.62
Kab. Lamongan	2011	17.40	6.67	900000	7.24	4.40
Kab. Lamongan	2012	16.64	6.92	950000	7.59	4.98
Kab. Lamongan	2013	16.12	6.93	1075700	7.79	4.93
Kab. Lamongan	2014	15.68	6.30	1220000	7.86	4.30
Kab. Lamongan	2015	15.38	5.77	1410000	7.61	4.10

Lampiran 2: Data Transformasi Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila Tahun 2006-2015.

Kabupaten/Kota	Tahun	Tingkat Kemiskinan (POV)	Pertumbuhan Ekonomi (GRO)	Upah Minimum (WAG)	Tingkat Pendidikan (EDU)	Tingkat Pengangguran (UNP)
Kab. Gresik	2006	3.23	1.92	13.41	2.13	2.06
Kab. Gresik	2007	3.18	1.90	13.52	2.13	2.10
Kab. Gresik	2008	3.06	1.85	13.60	2.13	2.01
Kab. Gresik	2009	2.95	2.23	13.79	2.14	1.95
Kab. Gresik	2010	2.80	1.93	13.83	2.14	2.04
Kab. Gresik	2011	2.73	1.95	13.94	2.16	1.47
Kab. Gresik	2012	2.66	1.98	14.04	2.19	1.91
Kab. Gresik	2013	2.63	1.93	14.37	2.19	1.52
Kab. Gresik	2014	2.60	1.86	14.60	2.18	1.62
Kab. Gresik	2015	2.61	1.66	14.81	2.23	1.74
Kab. Bangkalan	2006	3.51	1.57	13.22	1.61	2.56
Kab. Bangkalan	2007	3.45	1.61	13.28	1.61	2.07
Kab. Bangkalan	2008	3.49	1.59	13.34	1.61	1.98
Kab. Bangkalan	2009	3.42	1.60	13.48	1.64	1.61
Kab. Bangkalan	2010	3.34	1.69	13.56	1.64	1.76
Kab. Bangkalan	2011	3.27	1.20	13.65	1.65	1.36
Kab. Bangkalan	2012	3.20	-0.35	13.69	1.75	1.67
Kab. Bangkalan	2013	3.14	-1.66	13.80	1.73	1.91
Kab. Bangkalan	2014	3.11	1.97	13.91	1.78	1.74
Kab. Bangkalan	2015	3.12	-0.98	14.05	1.76	1.61
Kota Mojokerto	2006	2.37	1.71	13.24	2.25	2.33
Kota Mojokerto	2007	2.35	1.79	13.39	2.27	2.48
Kota Mojokerto	2008	3.23	1.92	13.41	2.13	2.06
Kota Mojokerto	2009	3.18	1.90	13.52	2.13	2.10
Kota Mojokerto	2010	3.06	1.85	13.60	2.13	2.01
Kota Mojokerto	2011	2.95	2.23	13.79	2.14	1.95
Kota Mojokerto	2012	2.80	1.93	13.83	2.14	2.04
Kota Mojokerto	2013	2.73	1.95	13.94	2.16	1.47
Kota Mojokerto	2014	2.66	1.98	14.04	2.19	1.91
Kota Mojokerto	2015	2.63	1.93	14.37	2.19	1.52
Kab. Mojokerto	2006	2.60	1.86	14.60	2.18	1.62
Kab. Mojokerto	2007	2.61	1.66	14.81	2.23	1.74

Kabupaten/Kota	Tahun	Tingkat Kemiskinan (POV)	Pertumbuhan Ekonomi (GRO)	Upah Minimum (WAG)	Tingkat Pendidikan (EDU)	Tingkat Pengangguran (UNP)
Kab. Mojokerto	2008	2.18	1.66	13.44	2.27	2.49
Kab. Mojokerto	2009	1.97	1.64	13.54	2.27	2.23
Kab. Mojokerto	2010	2.00	1.81	13.60	2.30	2.02
Kab. Mojokerto	2011	1.93	1.79	13.64	2.31	1.77
Kab. Mojokerto	2012	1.87	1.81	13.68	2.31	1.99
Kab. Mojokerto	2013	1.89	1.82	13.85	2.30	1.75
Kab. Mojokerto	2014	1.86	1.76	14.04	2.31	1.49
Kab. Mojokerto	2015	1.82	1.75	14.18	2.31	1.59
Kota Surabaya	2006	2.83	1.70	13.39	1.97	2.08
Kota Surabaya	2007	2.70	1.78	13.51	2.04	1.90
Kota Surabaya	2008	2.68	1.77	13.60	2.04	1.95
Kota Surabaya	2009	2.58	1.65	13.79	2.05	1.71
Kota Surabaya	2010	2.50	1.91	13.82	2.06	1.58
Kota Surabaya	2011	2.43	1.89	13.92	2.08	1.46
Kota Surabaya	2012	2.37	1.98	14.03	2.07	1.23
Kota Surabaya	2013	2.39	1.88	14.35	2.11	1.15
Kota Surabaya	2014	2.36	1.86	14.53	2.12	1.34
Kota Surabaya	2015	2.36	1.73	14.81	2.10	1.40
Kab. Sidoarjo	2006	2.09	1.85	13.39	2.27	2.27
Kab. Sidoarjo	2007	2.08	1.84	13.52	2.28	2.45
Kab. Sidoarjo	2008	2.11	1.83	13.60	2.29	2.47
Kab. Sidoarjo	2009	1.91	1.71	13.76	2.30	2.16
Kab. Sidoarjo	2010	1.96	1.96	13.85	2.30	1.92
Kab. Sidoarjo	2011	1.89	1.96	13.92	2.30	1.64
Kab. Sidoarjo	2012	1.83	1.99	14.04	2.30	1.62
Kab. Sidoarjo	2013	1.79	2.03	14.37	2.30	1.67
Kab. Sidoarjo	2014	1.76	1.94	14.60	2.31	1.76
Kab. Sidoarjo	2015	1.76	1.79	14.81	2.36	1.95
Kab. Lamongan	2006	2.56	1.68	13.39	2.25	2.24
Kab. Lamongan	2007	2.57	1.61	13.52	2.25	2.54
Kab. Lamongan	2008	2.12	1.57	13.59	2.25	2.48
Kab. Lamongan	2009	1.93	1.59	13.77	2.28	2.32
Kab. Lamongan	2010	2.01	1.73	13.82	2.29	2.12
Kab. Lamongan	2011	1.95	1.95	13.92	2.29	1.56
Kab. Lamongan	2012	1.86	1.98	14.04	2.29	1.65
Kab. Lamongan	2013	1.90	1.93	14.36	2.33	1.42
Kab. Lamongan	2014	1.86	1.86	14.60	2.31	1.36
Kab. Lamongan	2015	1.86	1.66	14.81	2.35	1.84

Lampiran 3: **Hasil Regresi Model Data Panel *Pooled Least Square (Common Effect Model)***

Pooled Least Square (Common Effect Model)

Dependent Variable: POV
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/22/17 Time: 14:41
 Sample: 2006 2015
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GRO	0.093007	0.054940	1.692892	0.0953
WAG	-0.090493	0.103922	-0.870779	0.3871
EDU	-2.272520	0.186187	-12.20555	0.0000
UNP	0.117807	0.114861	1.025648	0.3089
C	8.189919	1.407806	5.817504	0.0000
R-squared	0.812294	Mean dependent var		2.517571
Adjusted R-squared	0.800743	S.D. dependent var		0.536198
S.E. of regression	0.239349	Akaike info criterion		0.046965
Sum squared resid	3.723730	Schwarz criterion		0.207572
Log likelihood	3.356227	Hannan-Quinn criter.		0.110760
F-statistic	70.32150	Durbin-Watson stat		0.214879
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4: **Hasil Regresi Model Data Panel Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)**

Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Dependent Variable: POV
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/22/17 Time: 14:42
 Sample: 2006 2015
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GRO	-0.005876	0.026999	-0.217647	0.8285
WAG	-0.190527	0.058197	-3.273820	0.0018
EDU	-1.510129	0.481710	-3.134933	0.0027
UNP	0.173570	0.054733	3.171242	0.0024
C	8.030471	0.891602	9.006789	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.970773	Mean dependent var	2.517571
Adjusted R-squared	0.965820	S.D. dependent var	0.536198
S.E. of regression	0.099132	Akaike info criterion	-1.641399
Sum squared resid	0.579803	Schwarz criterion	-1.288064
Log likelihood	68.44895	Hannan-Quinn criter.	-1.501050
F-statistic	195.9696	Durbin-Watson stat	1.048655
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5: **Hasil Regresi Model Data Panel Pendekatan Efek Acak**
(Random Effect Model)

Pendekatan Efek Acak (Random Effect Model)

Dependent Variable: POV
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/22/17 Time: 14:42
Sample: 2006 2015
Periods included: 10
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 70
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GRO	-0.011635	0.025546	-0.455462	0.6503
WAG	-0.166705	0.052881	-3.152459	0.0024
EDU	-1.852709	0.322430	-5.746078	0.0000
UNP	0.164868	0.054058	3.049860	0.0033
C	8.449064	0.773172	10.92779	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.236013	0.8500
Idiosyncratic random			0.099132	0.1500
Weighted Statistics				
R-squared	0.776079	Mean dependent var		0.331485
Adjusted R-squared	0.762299	S.D. dependent var		0.204891
S.E. of regression	0.099894	Sum squared resid		0.648619
F-statistic	56.32011	Durbin-Watson stat		0.986090
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.785198	Mean dependent var		2.517571
Sum squared resid	4.261268	Durbin-Watson stat		0.150096

Lampiran 6: **Hasil Regresi Penentuan Model (*Chow Test*)**

Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	53.320280	(6,59)	0.0000
Cross-section Chi-square	130.185446	6	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: POV
Method: Panel Least Squares
Date: 12/22/17 Time: 14:43
Sample: 2006 2015
Periods included: 10
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GRO	0.093007	0.054940	1.692892	0.0953
WAG	-0.090493	0.103922	-0.870779	0.3871
EDU	-2.272520	0.186187	-12.20555	0.0000
UNP	0.117807	0.114861	1.025648	0.3089
C	8.189919	1.407806	5.817504	0.0000
R-squared	0.812294	Mean dependent var		2.517571
Adjusted R-squared	0.800743	S.D. dependent var		0.536198
S.E. of regression	0.239349	Akaike info criterion		0.046965
Sum squared resid	3.723730	Schwarz criterion		0.207572
Log likelihood	3.356227	Hannan-Quinn criter.		0.110760
F-statistic	70.32150	Durbin-Watson stat		0.214879
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 7: **Hasil Regresi Penentuan Model (*Hausman Test*)**

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.002605	4	0.2870

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
GRO	-0.005876	-0.011635	0.000076	0.5098
WAG	-0.190527	-0.166705	0.000591	0.3269
EDU	-1.510129	-1.852709	0.128083	0.3385
UNP	0.173570	0.164868	0.000073	0.3099

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: POV

Method: Panel Least Squares

Date: 12/22/17 Time: 14:43

Sample: 2006 2015

Periods included: 10

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.030471	0.891602	9.006789	0.0000
GRO	-0.005876	0.026999	-0.217647	0.8285
WAG	-0.190527	0.058197	-3.273820	0.0018
EDU	-1.510129	0.481710	-3.134933	0.0027
UNP	0.173570	0.054733	3.171242	0.0024

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.970773	Mean dependent var	2.517571
Adjusted R-squared	0.965820	S.D. dependent var	0.536198
S.E. of regression	0.099132	Akaike info criterion	-1.641399
Sum squared resid	0.579803	Schwarz criterion	-1.288064
Log likelihood	68.44895	Hannan-Quinn criter.	-1.501050
F-statistic	195.9696	Durbin-Watson stat	1.048655
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 8: **Hasil Regresi Penentuan Model (*Lagrange Multiplier Effect Test*)**

Lagrange Multiplier Effect Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	174.1473 (0.0000)	1.660203 (0.1976)	175.8075 (0.0000)
Honda	13.19649 (0.0000)	-1.288488 --	8.420228 (0.0000)
King-Wu	13.19649 (0.0000)	-1.288488 --	9.407045 (0.0000)
Standardized Honda	16.70458 (0.0000)	-0.959871 --	7.188343 (0.0000)
Standardized King-Wu	16.70458 (0.0000)	-0.959871 --	8.520809 (0.0000)
Gourierioux, et al.*	--	--	174.1473 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	